



**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PENGAWASAN, DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY***

*Stefanus Lobo Royman*

**PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI KEMUDAHAN, DAN DAYA TARIK PROMOSI TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN *E-MONEY* DI KOTA SEMARANG**

*Edo Rifqi Brilianto dan Fitri Arianti*

**PENGARUH KEPRIBADIAN HARDINESS, LINGKUNGAN KELUARGA, DAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA MANAJEMEN DI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

*Tri Adi Susanto, Kusuma Chandra Kirana, dan Didik Subiyanto*

**PENGARUH TIPE INDUSTRI TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN UKURAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI *VARIABEL MODERATING***

*Teguh Erawati, Revita Rati Nurohmah*

**MODEL BISNIS KONTRAK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PROYEK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UMBULAN**

*Andriyani, Dini Rosdini, dan Harry Suharman*

**PENGARUH MEDIA SOSIAL, REFERENSI DAN *WORD OF MOUTH* TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN: STUDI KASUS CANDI RATU BOKO YOGYAKARTA**

*M. Sayid Habibur Rohman, Muinah, dan Susanto*



JURNAL EKONOMI DAN BISNIS	VOL. 14	NO. 3	Hal. 129-193	NOVEMBER 2020	P ISSN 1978-3116 E ISSN 2621-7880
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------	--------------------------------------

Bekerja sama dengan



## **JURNAL EKONOMI DAN BISNIS**

### **EDITOR IN CHIEF**

Djoko Susanto  
STIE YKPN Yogyakarta

### **EDITORIAL BOARD MEMBERS**

**Dody Hapsoro**  
STIE YKPN Yogyakarta

**I Putu Sugiarta Sanjaya**  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Dorothea Wahyu Ariani**  
Universitas Maranatha Bandung

**Jaka Sriyana**  
Universitas Islam Indonesia

**Baldric Siregar**  
STIE YKPN Yogyakarta

### **MANAGING EDITOR**

Rudy Badrudin  
STIE YKPN Yogyakarta

### **EDITORIAL SECRETARY**

Shita Lusi Wardhani  
STIE YKPN Yogyakarta

### **PUBLISHER**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1120 • Fax. (0274) 486155

### **EDITORIAL ADDRESS**

Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 • Fax. (0274) 486155  
<http://stieykn.ac.id/journal/index.php/jeb> • e-mail: [rudy.badrudin@stieykn.ac.id](mailto:rudy.badrudin@stieykn.ac.id)  
Bank Mandiri atas nama STIE YKPN Yogyakarta No. Rekening 137 - 0095042814

Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB) terbit sejak tahun 2007. JEB merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta. Penerbitan JEB dimaksudkan sebagai media penguatan karya ilmiah baik berupa kajian ilmiah maupun hasil penelitian di bidang ekonomi dan bisnis. Setiap naskah yang dikirimkan ke JEB akan ditelaah oleh MITRA BESTARI yang bidangnya sesuai. Penulis akan menerima lima eksemplar cetak lepas (off print) setelah terbit.

JEB diterbitkan setahun tiga kali, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan Nopember. Harga langganan JEB Rp25.000,- ditambah biaya kirim Rp25.000,- per eksemplar. Berlangganan minimal 1 tahun (volume) atau untuk 3 kali terbitan. Kami memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam mengarsip karya ilmiah dalam bentuk electronic file artikel-artikel yang dimuat pada JEB dengan cara mengakses artikel-artikel tersebut di website STIE YKPN Yogyakarta (<http://stieykn.ac.id/journal/index.php/jeb>)

## DAFTAR ISI

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PENGAWASAN, DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY***

*Stefanus Lobo Royman*  
**129-141**

**PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI KEMUDAHAN, DAN DAYA TARIK PROMOSI TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN *E-MONEY* DI KOTA SEMARANG**

*Edo Rifqi Brilianto*  
*Fitrie Arianti*  
**143-148**

**PENGARUH KEPERIBADIAN *HARDINESS*, LINGKUNGAN KELUARGA, DAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA MANAJEMEN DI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

*Tri Adi Susanto*  
*Kusuma Chandra Kirana*  
*Didik Subiyanto*  
**149-155**

**PENGARUH TIPE INDUSTRI TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN UKURAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI *VARIABEL MODERATING***

*Teguh Erawati*  
*Revita Rati Nurohmah*  
**157-169**

**MODEL BISNIS KONTRAK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PROYEK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UMBULAN**

*Andriyani*  
*Dini Rosdini*  
*Harry Suharman*  
**171-183**

**PENGARUH MEDIA SOSIAL, REFERENSI, DAN *WORD OF MOUTH* TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN: STUDI KASUS CANDI RATU BOKO YOGYAKARTA**

*M. Sayid Habibur Rohman*  
*Muinah*  
*Susanto*  
**185-193**

## **MITRA BESTARI JURNAL EKONOMI DAN BISNIS**

Editorial JEB menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MITRA BESTARI yang telah menelaah naskah sesuai dengan bidangnya. Berikut ini adalah nama dan asal institusi MITRA BESTARI yang telah melakukan telaah terhadap naskah yang masuk ke editorial JEB Vol. 14, No. 1, Maret 2020; Vol. 14, No. 2, Juli 2020; dan Vol. 14, No. 3, Nopember 2020.

**Andreas Lako**  
*Universitas Katholik Soegijapranata*

**Agus Suman**  
*Universitas Brawijaya*

**Akhmad Makhfatih**  
*Universitas Gadjah Mada*

**FX. Sugiyanto**  
*Universitas Diponegoro*

**HM. Wahyuddin**  
*Universitas Muhammadiyah Surakarta*

**J. Sukmawati Sukamulja**  
*Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

**Lincoln Arsyad**  
*Universitas Gadjah Mada*

**Mahmudah Enny W., M.Si.**  
*Universitas Bhayangkara Surabaya*

**R. Maryatmo**  
*Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

**Wasiaturrahma**  
*Universitas Airlangga*

## **PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PENGAWASAN, DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY**

**Stefanus Lobo Royman**

*E-mail: roymanevan29@gmail.com*

### **ABSTRACT**

This research was conducted at the Regional Work Unit (SKPD) of West Manggarai Regency which aimed at testing the effect of accountability, transparency, supervision, and budgetary participation on budget performance using the Value for Money concept. The sample selection method used in this study was a purposive sampling with a final sample of 62 respondents in 33 SKPD in West Manggarai Regency. The method of analysis employed was a Partial Least Square (PLS) approach with the help of WarpPLS software. The results showed that accountability has a negative effect on budget performance using the value for money concept while regarding the transparency, supervision and budgetary participation has a positive effect on budget performance using the value for money concept.

**Keywords:** accountability, transparency, supervision, budget participation, value for money

**JEL Classification:** H72, M41

### **PENDAHULUAN**

Perhatian pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata menjadi salah satu upaya dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat pembangunan harus

diarahkan dalam memacu pemerataan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki suatu daerah guna memenuhi fungsi otonomi secara nyata dan bertanggungjawab.

Terselenggaranya *Good Government Governance* yang merupakan system pemerintahan yang baik diharapkan dapat mewujudkan kebutuhan masyarakat dalam tujuan berbangsa dan bernegara. Tata pengelolaan organisasi sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan dan dapat dipertanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi biasa disebut *good governance* (Halim dan Damayanti, 2012).

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk atas pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi yang tepat sasaran melalui suatu media yang dipertanggungjawabkan secara teratur setiap periodenya (Turner dan Hulme, 1997). Dalam organisasi publik menjadi suatu kewajiban dari masing- masing instansi dalam meningkatkan akuntabilitas agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan dari proses pencapaian tujuan instansi tersebut.

Transparansi publik yang dilakukan oleh suatu organisasi publik dengan maksud untuk menampilkan semua informasi kepada masyarakat secara transparan dan jujur sehingga dapat dipahami dan diawasi oleh pihak yang memiliki kepentingan (Cindy *et al.*, 2018). Sehubungan dengan penyampain laporan keuangan daerah telah terjadi banyak perubahan yaitu bahwa setiap kepala daerah harus menyampaikan dua jenis

laporan keuangan berupa neraca dan laporan arus kas. Hal yang paling utama dalam melihat seberapa jauh keterbukaan penyusunan anggaran daerah adalah seberapa besar efek yang dirasakan masyarakat dari penyusunan dan rincian alokasi APBD telah disampaikan pada masyarakat secara intensif. Kecendrungan yang banyak terjadi adalah proses pengambilan kebijakan APBD daerah hanya didominasi oleh anggota legislatif, bupati, dan beberapa pejabat birokrasi.

Agar penggunaan anggaran dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan target, membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak seperti badan legislatif dan badan pengawas khusus yang dibuat untuk melihat dan mengontrol pembuatan dan implementasi anggaran. Pengendalian atau control merupakan kegiatan yang perlu dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan sistem dari suatu organisasi. Sedangkan pemeriksaan merupakan kegiatan yang dijalankan akuntan yang mempunyai wewenang secara independen dan mempunyai legalitas secara profesional untuk melakukan pemeriksaan kinerja dari pemerintah daerah berdasarkan aturan yang berlaku.

Penganggaran merupakan proses pemerintah daerah dalam menyusun anggaran guna tercapainya penggunaan anggaran secara tepat dan sesuai dengan program pemerintah daerah. Agar penggunaan anggaran dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan target, kerjasama antara berbagai elemen seperti bawahan dan atasan perlu dilakukan. Wulandari (2013) mengatakan keterlibatan berbagai elemen dalam membuat anggaran pada suatu organisasi biasa disebut sebagai partisipasi anggaran.

*Value for Money* adalah proses penyusunan anggaran yang didasarkan pada beberapa indikator antara lain ekonomis, efisien dan efektivitas (Mardiasmo, 2002). Adanya beberapa temuan yang menemukan bahwa pengelolaan anggaran yang kurang baik memperlihatkan bahwa pelaksanaan prinsip *value for money* harus dilakukan. Berdasarkan UU 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1 harus dikelola secara efisien dan ekonomis guna memberikan manfaat yang baik masyarakat.

Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat fenomena yang terjadi dimana pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendapat opini WTP dari BPK dan mendapat Skor EKPPD yang cukup tinggi dari Kementrian Dalam Negeri terkait

dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil ini adalah suatu prestasi yang sangat baik bagi Kabupaten Manggarai Barat. Namun disisi lain peneliti ingin melihat bahwa pencapaian yang diraih ini karena pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat sudah menerapkan kinerja anggaran secara efektif, ekonomis, dan efisien (*value for money*) atau tidak. Dalam penelitian terdahulu, peneliti juga menemukan bahwa kinerja anggaran berbasis VFM dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan Julian Barr dan Angela Christie (2015), Parigi *et al.* (2004) dan Purnomo dan Putri (2018) menjelaskan bahwa bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis VFM. Nouri dan Parker (1998) dan Chong dan Chong (2002) dalam penelitian mereka menemukan bahwa partisipasi anggaran memiliki hubungan dengan kinerja suatu organisasi. Demirag dan Khadaroo (2011) menemukan bahwa akuntabilitas tidak sepenuhnya berpengaruh pada konsep kinerja berbasis VFM. Penelitian lain juga seperti Johnsen *et al.* (2001) menemukan meskipun penerapan kinerja berbasis *value for money* diterapkan perbaikan dari sisi pengawasan masih rendah terkait dengan efisiensi anggaran. Hasil penelitian Cindy *et al.* (2018) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas memberikan hasil negatif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*, sedangkan transparansi dan pengawasan memberikan hasil positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Hasil serupa juga di temukan pada penelitian Sinuraya (2009) many of those researches' result are still indicated inconsistent. Empirically, this study tested the influence of budget adequacy and job-relevant information as variable intervening on the relationship between budget participation and managerial performance. Data were collected through questionnaire and distributed to 900 production managers or chief operational officers or production supervisors at garment and textile companies in West Java and Banten. Meanwhile, questionnaires which had been collected and processed were 239 questionnaires (with responds rate 26,1%, peneliti mengatakan hubungan antara keterlibatan antaran atasan dan bawahan dalam menyusun anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Teori Keagenan

Teori keagenan adalah hubungan yang terjadi antara pihak prinsipal dan agen. Dalam pembahasan yang berkaitan dengan teori ini menjelaskan suatu pihak tertentu mendelegasikan pekerjaannya kepada agen. Teori ini melihat bahwa agen tidak bisa diberi kepercayaan dalam mengurus kepentingan *principal* (Tricker dan Opcit, 1984). Uraian di atas menjelaskan bahwa teori keagenan ingin menjelaskan terkait dengan masalah yang timbul diantara pihak yang bekerjasama dan mempunyai tujuan yang berbeda.

Eisenhardt mengatakan bahwa teori keagenan terdiri dari beberapa asumsi yaitu sifat manusia, asumsi informasi dan asumsi keorganisasian. Pada asumsi sifat manusia ada tiga bagian yang dipakai yaitu *self interest*, *bounded rationality*, dan *risk aversion*. Asumsi informasi mengatakan informasi adalah suatu komoditas yang biasa dibeli. Sedangkan asumsi keorganisasian terdiri dari tiga bagian yaitu konflik sebagai tujuan partisipan, efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas dan asimetri informasi antara pemilik agen.

Berdasar uraian tentang atas teori keagenan didefinisikan sebagai keterkaitan antara publik dan pemerintah layaknya hubungan antara agen dan prinsipal. Publik dilihat sebagai pemberi tanggungjawab dan pemerintah adalah agen. Masyarakat dalam hal ini prinsipal memberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya seperti pajak dan lain-lain. Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh agen terhadap prinsipal, agen memberikan laporan atas aktivitas yang telah dibuatnya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Pihak ketiga hadir untuk membantu prinsipal dalam menjelaskan apa yang dilaporkan oleh agen kepada prinsipal sehingga terhindar dari asimetri informasi. Pada posisi pihak ketiga ini kehadiran akuntan sangat diharapkan mengingat sebagian besar informasi yang disampaikan oleh agen kepada prinsipal sebagian besar berupa informasi keuangan. Akuntan berperan sebagai auditor dan menempati posisi penting dalam mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen.

### Anggaran Berbasis Kinerja

Terdapat banyak pemahaman tentang anggaran, *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*

menjelaskan bahwa perencanaan posisi keuangan yang menjelaskan posisi terkait dengan pengeluaran yang diusulkan dan menjelaskan sumber pendapatan untuk periode yang akan datang disebut sebagai anggaran, sedangkan menurut Wildavsky (1975) mendefinisikan anggaran adalah sebuah pencatatan pada masa lalu dan perencanaan masa depan.

Berdasar pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja dapat didefinisikan sebagai sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang mengutamakan hasil dari kegiatan yang telah direncanakan. Akibat dari anggaran berbasis kinerja adalah penggunaan dana yang sudah disusun dan disahkan untuk program dan kegiatan harus dapat dijelaskan secara spesifik.

Anggaran kinerja harus mencerminkan tiga hal yaitu tujuan dari penggunaan dana, program yang dibuat untuk tujuan dan perhitungan dalam setiap program yang diusulkan. Cerminan dari anggaran kinerja akan berfokus pada efisiensi dalam implementasi suatu program. Anggaran tidak hanya berbicara tentang proses pembelanjaan melainkan harus didasarkan pada proses penyusunan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis.

### Konsep *Value for Money*

Salah satu bagian penting dalam system pemerintahan adalah *Value for Money*. Menurut Andrianto (2007) konsep *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap uang. Konsep ini secara garis besar menjelaskan tentang penghargaan secara layak terhadap nilai uang tersebut. *Value for Money* sebenarnya ingin menjelaskan kinerja sebuah organisasi sektor publik. Penilaian terhadap kinerja daerah tidak hanya dilihat dari apa yang dihasilkan melainkan harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome*. Indikator dari kinerja itu sendiri merupakan ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis artinya irit dan sesuai kegunaan, efisien artinya hasil yang diperoleh dapat dilihat dari biaya yang serendah-rendahnya dan efektivitas artinya kemampuan output dalam mencapai tujuan dan sasaran. Konsep ini dalam organisasi sector publik ingin menjelaskan tentang ekonomis, efisien dan efektif.

Konsep *value for money* sangat penting untuk diterapkan dalam konsep anggaran berbasis kinerja. Konsep ini lebih mengutamakan pada perancangan dan penentuan tujuan secara sistematis dalam proses

pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan perencanaan anggaran berbasis kinerja suatu organisasi publik tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja melainkan merencanakan kinerja yang ingin dicapai. Kinerja tersebut antaran lain dalam bentuk *output* dari kegiatan yang akan dijalankan dan *outcome* dari program yang telah ditetapkan.

### **Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas didefinisikan sebagai proses pertanggungjawaban lembaga-lembaga sektor publik pada masyarakat bukan hanya pertanggungjawaban secara vertikal (Turner dan Hulme, 1997). Mahmudi (2005) akuntabilitas publik merupakan salah bagian dari tanggungjawab pihak agen kepada masyarakat berkaitan dengan kepercayaan mengelola apa yang dimiliki oleh suatu daerah kemudian memberitahukan dan menjelaskan aktivitas dan program dari pemanfaatan sumber daya daerah pada pemberi kepercayaan (prinsipal).

Berdasarkan uraian diatas maka akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh para pelaksana kegiatan dan melaporkan semua aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan yang telah dibuat. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak yang telah memberikan kepercayaan bahwa pemanfaatan anggaran sudah dilakukan tepat sasaran.

### **Transparansi**

Menurut Loina (2003), kebebasan dalam mendapatkan informasi dan kemudahan akses terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah transparansi. Hasil kerja pemerintah biasanya berupa informasi kebijakan, upaya pembuatan dan pelaksanaan dan output yang dicapai oleh organisasi publik. Kemudahan dalam mengakses informasi terkait dengan kebijakan pemerintah akan menciptakan kegiatan politik yang baik, toleran dan keputusan yang dibuat bisa berdasarkan sumber yang jelas. Jika dikaitkan dengan anggaran maka transparansi merupakan peran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kegiatan pemerintah dalam meningkat kemandirian suatu daerah khususnya pada bagian keuangan daerah (Andrianto, 2007).

Transparansi merupakan upaya pemerintah daerah dalam menyampaikan semua informasi tentang aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah secara

terbuka. Transparansi anggaran akan memberikan dampak positif bagi kepentingan publik seperti pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mudah dan dalam mengidentifikasi kebijakan publik dapat dilihat kelemahan dan kelebihan kebijakan tersebut (Andrianto, 2007).

### **Pengawasan**

Menurut Baswir (2000), pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan. Upaya dalam menjamin proses pengelolaan keuangan negara berupa proses pengumpulan pemasukan negara, menyalurkan pengeluaran negara yang tidak meyimpang dari tujuan dan rencana penggunaan anggaran biasa disebut pengawasan.

Pengawasan adalah proses dalam melihat apa yang dilakukan pemerintah secara menyeluruh terhadap segala kegiatan pemerintah daerah dengan maksud agar segala aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik. Keberadaan fungsi pengawasan ini sendiri dapat meminimalisir terjadinya praktek menyimpang suatu organisasi publik. Tujuan pengawasan adalah mengawasi dengan sungguh-sungguh dan melihat keajadian sebenarnya, maka apabila terjadi dugaan pelanggaran makan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Temuan atas penyimpangan yang dilakukan dapat dijadikan sebagai peringatan dalam meningkatkan pengawasan (Baswir, 2000).

### **Partisipasi Anggaran**

Menurut Kenni (1979) dalam Syam dan Djalil (2006) partisipasi adalah keterlibatan pimpinan perusahaan dalam perencanaan anggaran dan pengaruh dari manajer dalam membuat *budget goal* pada perusahaan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sedangkan menurut GASB, anggaran adalah perencanaan posisi keuangan yang menjelaskan posisi terkait dengan pengeluaran yang diajukan dan menjelaskan dari mana pendapatan untuk periode yang akan datang. Anggaran juga merupakan rencana pengelolaan keuangan dalam mengelola pengeluaran setinggi tingginya dalam proses pemenuhan kebutuhan dimasa depan (Mardiasmo, 2009).

Garison *et al.* (2013) dalam Pratama dan Kiyah (2019) mengatakan bahwa partisipasi anggaran merupakan pendekatan *bottom-up* dalam penyusunan ang-



garan dalam suatu system yang memungkinkan peran bawahan dan atasan sama-sama memiliki wewenang dalam proses penyusunan anggaran. Penyusunan tersebut kemudian dilihat kembali dan disesuaikan pada manajemen yang memiliki tingkat lebih tinggi. Anggaran yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama akan menciptakan komitmen dari seluruh anggota organisasi sehingga pemenuhan atas penetapan anggaran tersebut dapat terpenuhi. Syam dan Djalil (2006) juga mendefinisikan partisipasi anggaran sebagai proses dimana pekerja dalam suatu perusahaan mempunyai pengaruh atas penyusunan anggaran dan adanya penghargaan atas target anggaran yang dibuat. Berdasarkan definisi diatas dapat dilihat bahwa partisipasi anggaran didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh atasan dan bawahan guna melakukan perencanaan anggaran dan akan memiliki dampak dimasa yang akan datang terkait dengan tanggungjawab dan target yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan.

Akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban para pemegang amanah memanfaatkan kekayaan daerah kemudian melaporkan dan menjelaskan kegiatan dan program dari pemanfaatan sumber daya kepada pemberi kepercayaan (Mardiasmo, 2009). Lain halnya menurut Mahmudi (2005) akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).

Penelitian yang dilakukan Barr dan Christie (2015) menjelaskan bahwa *value for money* merupakan kontrol baru di sektor pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas di seluruh pengeluaran sektor publik. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Putri (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Berdasar penjelasan tersebut maka hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

**H1:** Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*

Menurut Loina (2003) kemudahan dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah daerah disebut transparansi. Kegiatan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah biasa berupa informasi kebijakan,

proses pembuatan dan pelaksanaan dan hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah. Kemudahan dalam mengakses informasi terkait dengan kebijakan pemerintah akan menciptakan kegiatan politik yang baik, toleran dan kebijakan yang dibuat bisa berdasarkan sumber yang jelas. Transparansi anggaran akan memberikan dampak positif bagi kepentingan publik seperti pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mudah dan dalam mengidentifikasi kebijakan publik dapat dilihat kelemahan dan kelebihan kebijakan tersebut (Andrianto, 2007).

Penelitian Parigi *et al.* (2004) menemukan bahwa dalam sistem tranparansi pemerintah harus dapat memenuhi konsep *value for money* agar layanan publik dapat diberikan secara ekonomis dan efisien. Hasil ini sejalan dengan penelitian Purnomo dan Putri (2018) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Berdasar penjelasan tersebut maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

**H2:** Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*

Menurut Baswir (2000) pengawasan adalah suatu proses pemantuan kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan pengawasan adalah mengawasi dengan sungguh-sungguh dan memperoleh bukti berdasarkan fakta yang ada maka apabila terjadi dugaan pelanggaran maka dapat segera diketahui dan diperbaiki. Kemudian adanya upaya pelanggaran dapat digunakan sebagai peringatan bagi suatu entitas bahwa mereka harus memperhatikan system yang ada (Baswir, 2000).

Pada penelitian yang dilakukan Odia (2014) ditemukan bahwa penguatan pengawasan legislatif dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan independensi, tata kelola internal dan kualitas kerja, akan meningkatkan audit berbasis *Value for Money*. Hal ini didukung oleh penelitian Purnomo (2018) yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Berdasar penjelasan tersebut maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

**H3:** Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*

Partisipasi adalah keterlibatan individu baik

secara mental atau emosi dalam suatu komunitas untuk mewujudkan tujuan komunitas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Konsep penganggaran menjelaskan partisipasi merupakan upaya menghimpun para pekerja di dalam sebuah organisasi untuk menyusun anggaran sehingga penilaian terhadap kinerja dapat dilakukan dan pekerja akan merasa sangat dihargai karena terlibat dalam menyusun anggaran. Saat seorang pekerja akan diikutsertakan untuk menentukan keputusan dalam menganggarkan, maka pegawai akan menjadi termotivasi karena adanya kesempatan untuk merealisasikan kreatifitas dan inisiatifnya (Wulandari, 2013).

Penelitian Nouri dan Parker (1998) menemukan partisipasi anggaran menunjukkan pengaruh langsung dalam meningkatkan kinerja karena keterlibatan dari para pegawai dalam menyusun anggaran meningkatkan komitmen sehingga berpengaruh pada kinerja. Hasil ini didukung oleh penelitian Wulandari (2013) yang menjelaskan bahwa partisipasi anggaran dapat memberikan pengaruh yang positif pada kinerja aparat pemerintah. Kinerja anggaran dengan konsep *value for money* dalam pengukurannya akan mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome*. Partisipasi anggaran akan memberikan dampak terhadap komitmen para pegawai dalam proses menyusun anggaran secara efektif dan efisien karena dalam pelaksanaan suatu kegiatan semua pegawai dalam lingkungan pemerintah daerah terlibat dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga diharapkan para pegawai mampu menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah. Semakin dilibatkan semua elemen dalam menyusun anggaran maka kinerja dari pemerintah akan semakin baik. Berdasar penjelasan tersebut maka hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

**H4:** Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kabupaten Manggarai Barat. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Manggarai Barat karena pada tahun 2019 Kabupaten Manggarai Barat menjadi salah satu dari lima kabupaten yang menjadi fokus utama pembangunan wisata. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ASN di SKPD Kabupaten Manggarai Barat. Sampel dalam penelitian adalah bendahara di setiap SKPD Kabupaten Manggarai Barat. Pengum-

pulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan kuesioner. Peneliti mengumpulkan informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Manggarai Barat untuk mencari informasi terkait dengan variabel dalam penelitian. Kuesioner diberikan kepada responden dalam penelitian ini adalah bendahara di masing-masing SKPD.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja anggaran dengan konsep *value for money* (Y). Menurut Andrianto (2007) Konsep *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap uang. Konsep *value for money* dalam organisasi sektor publik menjelaskan tentang tiga elemen yaitu ekonomi, efisien dan efektif (Nordiawan dan Hertianti). Indikator kinerja anggaran dengan konsep *value for money* adalah menghindari pengeluaran yang boros (hemat), cermat dalam pengadaan sumber daya, penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu, menurunkan biaya pelayanan publik kinerja, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau pelayanan yang tepat sasaran, kesempatan sosial yang sama dan alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai proses pertanggungjawaban lembaga-lembaga sektor publik pada masyarakat bukan hanya pertanggungjawaban secara vertikal (Turner & Hulme, 1997). Indikator akuntabilitas adalah penghindaran penyalahgunaan jabatan, kepatuhan terhadap hukum, proses dan pertanggungjawabann anggaran, pemberian pelayan publik yang cepat, responsif dan murah biaya, pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal biaya minimal.

Menurut Loina (2003) kebebasan akses bagi setiap orang dalam memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah transparansi. Indikator transparansi adalah sistem-sistem keterbukaan kebijakan anggaran, dokumen anggaran mudah diakses, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara rakyat, sistem pemberian informasi kepada publik.

Menurut Baswir (2000) Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana aturan-aturan dan tujuan.

Indikator pengawasan adalah Input (masukan) pengawasan, proses pengawasan, Output (keluaran) pengawasan. Kuesioner pengawasan diadopsi dari Latifah (2017). Skala yang dipakai dalam penelitian ini skala likert. Jawaban untuk masing-masing pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 5.

Garison *et al.* (2013) dalam Pratama dan Kiyah (2019) mengatakan bahwa partisipasi anggaran merupakan pendekatan *bottom-up* dalam penyusunan anggaran dalam suatu system yang memungkinkan peran bawahan dan atasan sama-sama memiliki wewenang dalam proses penyusunan anggaran. Indikator partisipasi adalah memiliki pengaruh penyusunan anggaran, motivasi kerja, pendapat dalam menyusun anggaran, kepuasan menyusun anggaran, partisipasi aktif dan keandalan waktu.

Teknik analisis data adalah salah satu proses dalam penelitian yang dipakai dalam proses penelitian untuk menarik kesimpulan atas apa yang telah dibuat peneliti dan untuk menemukan solusi suatu permasalahan atau menemukan jawaban dari penelitian ini. Teknik dalam melakukan analisis data pada penelitian ini meliputi uji kualitas instrumen dan data, statistik deskriptif dan analisa model menggunakan *Partial Least Square* (PLS).

**HASIL PENELITIAN**

**Pengujian Inner Model**

Variabel kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* dipengaruhi oleh variabel eksogen yaitu akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi anggaran sebesar 61% dan sisanya 39% dijelaskan oleh variabel lain. Model structural *inner model* pada penelitian ini disebut fit apabila *p-value* dari ARS dan APC < 0,05, dan nilai dari AVIF < 5. Apabila penelitian ini lulus *Goodness of Fit Test*, maka penelitian ini bisa dilanjutkan pada tahap pengujian hipotesis. Pada tabel 1 disajikan hasil *Goodness of Fit* penelitian ini:

Berdasar Tabel 1 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi kriteria *Goodness of Fit*, sehingga data ini dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

Hipotesis 1 menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai *p-value* sebesar 0,17 lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,05 serta nilai  $\beta = 0,12$ . Dengan demikian, hipotesis 1 ditolak.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan

**Tabel 1**  
**Goodness of Fit**

Hasil	P-Value	Kriteria	Keterangan
APC = 0,274	0,005	< 0,05	Diterima
ARS = 0,608	< 0,001	< 0,05	Diterima
AVIF = 1,478		< 5, ideally < 3	Diterima

Sumber: Data diolah

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Prediksi	Koefisien Jalur	p-value	Keterangan
AK→VFM (H1)	+	-0,12	0,17	Ditolak
TR→VFM (H2)	+	0,21	0,04	Didukung
PG→VFM (H3)	+	0,39	< 0,01	Didukung
PA→VFM (H4)	+	0,39	< 0,01	Didukung

Sumber: Data diolah

konsep *value for money*. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai *p-value* sebesar 0,04 lebih kecil

dari tingkat signifikan yaitu 0,05 serta nilai  $\beta = 0,21$ . Dengan demikian, hipotesis 2 diterima.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai *p-value* < 0,01 lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05 serta nilai  $\beta = 0,39$ . Dengan demikian, hipotesis 3 diterima.

Hipotesis 4 menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai *p-value* < 0,01 lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05 serta nilai  $\beta = 0,39$ . Dengan demikian, hipotesis 4 diterima.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dalam proses pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat tidak mempengaruhi kinerja anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis. Penelitian ini didukung oleh Cindy et al (2018) yang juga menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang anggaran menjelaskan bahwa proses anggaran telah dilakukan melalui proses yang panjang dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala bidang anggaran mengatakan “*proses penyusunan anggaran sudah melalui proses yang panjang salah satunya musrembang dan dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat dan camat selaku kepala wilayah bagian kecamatan. Proses ini sudah dilakukan dan diharapkan mampu menciptakan anggaran secara adil, efisien dan ekonomis*”. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Anggaran semakin mempertegas bahwa proses penyusunan anggaran sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun disisi lain, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban para pemegang amanah untuk mengelola dan melaporkan segala aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dan defenisi ini sejalan dengan teori agensi. Pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah daerah kemudian akan dinilai apakah sudah dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Opini BPK

yang menyatakan bahwa bahwa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2018 mendapat opini WTP tidak memberikan pengaruh bagi pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat dalam menyusun anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money***

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat tranparansi maka akan semakin tinggi kinerja anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Parigi et al. (2004) yang menemukan bahwa dalam system tranparansi pemerintah harus dapat, memenuhi konsep *value for money*, agar layanan publik dapat diberikan secara ekonomis dan efisien. Hal ini didukung oleh penelitian Purnomo dan Putri (2018) yang menunjukkan, bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan pernyataan dari Bapak Van selaku kepala bidang anggaran yaitu “*transparansi merupakan suatu hal yang sangat teknis dan pemerintah manggarai barat telah berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan seperti musrembang dan semua kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh SKPD bisa diakses pada website kabupaten Manggarai Barat*”. Hasil wawancara ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan kabupaten Manggarai Barat secara transparan telah dilakukan dengan baik guna terciptanya tata kelola pemerintah yang efisien, ekonomis dan efektif.

### **Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money***

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh secara positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan pengawasan pada pemerintah daerah kabupaten Mangarai Barat baik dalam mengelola anggaran secara efektif, ekonomis dan efisien.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan Oda (2014) ditemukan bahwa penguatan pengawasan legislatif dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan independensi, tata kelola internal dan kualitas kerja, akan meningkatkan audit kinerja berbasis *value for money*. Hal ini didukung oleh penelitian Purnomo (2018) yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggaran, berbasis *value for money*. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat secara menyeluruh sudah biasa dikatakan baik. Hal ini sejalan dengan Mardiasmo (2006) yang mengatakan bahwa kinerja anggaran terdiri dari tiga elemen dasar yaitu masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah. Pengawasan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Namun pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat harus memperhatikan terkait dengan skala prioritas revisi anggaran agar dilakukan dengan baik karena dari hasil pengujian indikator PG 6 terkait dengan revisi anggaran memperoleh nilai korelasi paling rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang anggaran yang mengatakan “*informasi terkait dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan baik oleh DPR selaku pihak legislatif dimana anggaran selalu dibahas bersama DPR dan selalu dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh BPK RI dan Inspektorat terhadap setiap penggunaan anggaran pemerintah kabupaten Manggarai Barat dengan harapan agar pengelolaan anggaran bisa dilakukan secara efektif*”. Pernyataan yang disampaikan oleh kepala bidang anggaran semakin memperkuat hasil penelitian ini yang mengatakan system transparan berpengaruh secara positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*.

#### **Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money***

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh secara positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja anggaran secara efisien, ekonomis dan efektif.

Penelitian ini didukung oleh Nouri dan Parker

(1998) menemukan partisipasi anggaran menunjukkan pengaruh langsung dalam meningkatkan kinerja karena keterlibatan dari para pegawai dalam menyusun anggaran meningkatkan komitmen sehingga berpengaruh pada kinerja. Hasil ini didukung oleh penelitian Wulandari (2013) hubungan antara partisipasi anggaran searah dengan kinerja aparat pemerintah. Semakin tinggi partisipasi anggaran maka kinerja aparat pemerintah daerah juga akan semakin tinggi pula. Keterlibatan pegawai pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan moral kerja yang tinggi dari pegawai. Pegawai akan lebih cenderung menyusun anggaran berdasarkan standar dan kondisi yang sebetulnya terjadi. Moral yang tinggi pula akan mengarahkan perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Berkaitan partisipasi anggaran kepala bidang anggaran mengatakan “*seluruh SKPD selalu dilibatkan dalam penyusunan anggaran, adapun hal teknis yang butuh penjelasan terkait anggaran yang diusulkan dinamakan asistensi TAPD. Proses ini menjadi sarana pengendali untuk mengakomodir anggaran yang diusulkan oleh masing-masing SKPD. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran, menghindari manipulasi anggaran dan menciptakan anggaran secara value for money*”. Keterlibatan para pegawai dalam proses penyusunan anggaran telah dilakukan oleh seluruh ASN yang ada di kabupaten Manggarai Barat sehingga hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala bidang anggaran kabupaten Manggarai Barat sejalan dengan penelitian ini yaitu partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Analisis dilakukan dengan menggunakan PLS dengan alat statistika Warp-PLS. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh bendahara di masing-masing SKPD pada kabupaten Manggarai Barat.

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara negatif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat tidak mempengaruhi kinerja anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis.

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Sikap transparansi yang dibangun oleh pemerintah daerah Manggarai Barat guna diperolehnya kemudahan akses terkait dengan pelaporan pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah kepada publik secara tidak langsung akan meningkatkan upaya pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, ekonomis dan efisien.

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh secara positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat secara menyeluruh sudah biasa dikatakan baik. Hal ini sejalan dengan Mardiasmo (2006) yang mengatakan bahwa kinerja anggaran terdiri dari tiga elemen dasar yaitu masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah. Pengawasan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja anggaran dengan konsep *value for money*.

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh secara positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money*. Keterlibatan pegawai pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan moral kerja yang tinggi dari pegawai. Pegawai akan lebih cenderung menyusun anggaran berdasarkan standar dan kondisi yang sebetulnya terjadi. Moral yang tinggi pula juga akan mengarahkan perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi.

#### **Keterbatasan**

Walaupun penelitian ini sudah dirancang dengan baik, tetapi masih terdapat keterbatasan. Pada penelitian ini responden yang dipilih hanya bendahara saja padahal dalam suatu SKPD ada bagian yang khusus terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Kemudian peneli-

tian ini hanya melibatkan ASN yang berada di ibu kota kabupaten diharapkan penelitian selanjutnya bisa melibatkan ASN yang ada di masing-masing kecamatan.

#### **Saran**

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian dengan mencari variabel-variabel yang memberi gambaran lebih baik mengenai kinerja anggaran dengan konsep VFM. Kemudian penelitian selanjutnya dapat menambah pengukuran yang digunakan dalam menggambarkan variabel dependen dalam penelitian ini dan penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas jangkauan penelitian untuk memperlihatkan hasil yang lebih baik.

#### **Implikasi**

Terdapat beberapa implikasi dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu membuktikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat telah dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran pada publik tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat sehingga mampu menarik pengunjung dan investor ke kabupaten Manggarai barat. Kemudian penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan para pejabat di Kabupaten Manggarai Barat dalam mengambil keputusan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriani, C., Salle, D. A. Rande, A. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money. *Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13: 14–15.
- Anggarini, Yunita dan B. Hendra Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta

- Bergman, M. & Jan-Erik Lane. 1990. *Public Policy in a Principal-Agent Framework. Journal of Theoretical Politics*. 2: 339-352
- BPK. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Budi Purnomo, C. P. 2018. Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3): 467–480. doi: 10.17509/jrak.v4i3.4670.
- Chong, V. K. and Chong, K. M. 2002. *Budget Goal Commitment and Informational Effects of Budget Participation on Performance: A Structural Equation Modeling Approach. Behavioral Research in Accounting*, 14(1): 65–86. doi: 10.2308/bria.2002.14.1.65.
- Cindy, A., Salle, D. A. and Andika Rante. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money. *Akuntansi & Keuangan Daerah*. 13: 14–15.
- Demirag, I. and Khadaroo, I. 2011. *Accountability and value for money: A theoretical framework for the relationship in public-private partnerships*, *Journal of Management and Governance*. 15(2): 271–296. doi: 10.1007/s10997-009-9109-6.
- Fama, Eugene F. and Jensen, Michael C. 1983. *Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economic*, 26.
- Hair, J.F.J., Anderson, R.E., Tathan, R.L. dan Black, W.C. 2012. *Multivariate Data Analysis*. 7<sup>th</sup> edition, Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Halim, A., Iqbal, M., & Amri, I. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A., Iqbal, M., & Damayanti, T. 2012. *Pencapaian Akuntabilitas Publik Melalui Pengelolaan yang Baik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A., Iqbal, M., & Sukarna, N. 2012. *Audit dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A., Iqbal, M., & Wahyuni, E. 2012. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Potret dari Pertanggungjawaban Administrasi dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A., Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Indra, Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Johnsen, A. 2001. *Performance auditing in local government: An exploratory study of perceived efficiency of municipal value for money auditing in finland and norway. International Journal of Phytoremediation*, 21(1): 583–599. doi: 10.1080/09638180126803.
- Jonathan, Sawarno. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Julian Barr and Angela Christie. 2015. *Improving the Practice of Value for Money. Centre for Development Impact PRACTICE PAPER*, 12.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional.

- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Latifah, Sinaga. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Pengawasan dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Loina Lalolo Krina P. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2005. Pokok-pokok Pikiran PP 58/2005, Pengelolaan Keuangan Daerah/PKD, Workshop Implikasi PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Daerah. Yogyakarta: MEP UGM.
- Mudhofar, K. and Tahar, A. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2): 176–185. doi: 10.18196/jai.2016.0053.176-185.
- Mustofa, A. I. 2012. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang, *Accounting Analysis Journal*, 1(1). doi: 10.15294/aaj.v1i1.299.
- Moe, T. M. 1984. *The new economics of organization*. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- Nico Andrianto. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nugrahani, Siwi, T. 2007. Analisis Penerapan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: AKMENIKA UPY.. 1.
- Nordiawan dan Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Nouri, H. and Parker, R. J. 1998. *The relationship between budget participation and job performance: The roles of budget adequacy and organizational commitment*. *Accounting, Organizations and Society*, 23(5–6): 467–483. doi: 10.1016/S0361-3682(97)00036-6.
- Odia, J. O. 2014. *Performance Auditing and Public Sector Accountability in Nigeria : The Roles of Supreme Audit Institutions ( SAIs )*. *Asian Journal of Management Sciences & Education*, 3(4):102–109.
- Otley, D. 1999. *Performance management: A framework for management control systems research*. *Management Accounting Research* (December): 363-382
- Parigi, V. K., Geeta, P. and Kailasam, R. 2004. *Ushering in transparency for good governance*:1–16.
- Pratama, Anggi , D A N Kiyah, M. 2019. Pengaruh Partisipasi, Kejelasan Sasaran, Group Cohesiveness dan Informasi Asimetri Anggaran terhadap Budgetary Slack di Seluruh Kecamatan Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(November):139–150. doi: 10.31289/jab.v5i2.2677.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Robert I. Tricker, 1984. *Corporate Governance-Practise, Procedurs, and Power in British Companies and Their Board of Director*. UK, Gower.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie 2016. *Research Methods for Busines*. Edisi Ketujuh. United Kingdom: John Wiley dan Sons.



- Setyapurnama, Yudi Santara dan Vianey Norpratiwi. 2006. Pengaruh Corporate Governance terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi. Surakarta: UNS.
- Sinuraya, C. 2009 Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajer: Peran Kecukupan Anggaran dan Job-Relevan Information sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 1(1): 17–39.
- Soleman, Rusman. 2012. Pengaruh Penganggaran Partisipatif terhadap Kinerja Manajemen dengan Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Siasat Bisnis*, 16(1): 87-105.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Syam, F. B. . and Djalil, M. a. 2006. Pengaruh Orientasi Profesional Terhadap Konflik Peran: Interaksi Antara Partisipasi Anggaran dan Pengguna Anggaran Sebagai Alat Ukur Kinerja dengan Orientasi Manajerial: 1–19.
- Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Turner, Mark and Hulme, David, 1997. *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Liputan6.com. 2019. Pembangunan Kawasan Wisata Super Prioritas Selesai dalam 2 Tahun. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4009502/pembangunan-kawasan-wisata-super-prioritas-selesai-dalam-2-tahun>. Diakses 19 Oktober 2019.
- Wulandari, N. 2013. Pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kota Padang: 1–24.
- Wildavsky, A. 1975. *Budgeting: A Comparative Theory of Budgetary Processes*. Boston/Toronto: Little, Brown & Company.
- Web Kementerian Pariwisata. 2019. Siaran Pers : Menpar Berkomitmen Bangun Sinergi Rampungan Pembangunan Infrastruktur 4 Destinasi Wisata Super Prioritas Hingga 2020. <http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-menpar-berkomitmen-bangun-sinergi-rampungan-pembangunan-infrastruktur-4-destinasi-wisata-super-prioritas-hingga-2020>. Diakses 19 Oktober 2019.

## **PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI KEMUDAHAN, DAN DAYA TARIK PROMOSI TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN E-MONEY DI KOTA SEMARANG**

*Edo Rifqi Brilianto*  
*Fitrie Arianti*

Departemen IESP, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

*E-mail: [edorifqi@gmail.com](mailto:edorifqi@gmail.com)*

### **ABSTRACT**

E-Money is an inseparable part of human life, especially the millennial generation. Almost all transactions are carried out online because it is very easy and efficient. Semarang City is a big city that has many universities and students, so many students use e-money. The purpose of this study was to analyze the factors that influence student interest in using e-money in the city of Semarang. The method used in this research is nonprobability sampling with purposive sampling. Respondents are students who use the e-money application in the city of Semarang. This study uses primary data collected from distributed questionnaires and involves 40 respondents. In multiple linear regression analysis, there are 3 independent variables. The results of the analysis show that the variables of perceived usefulness and promotional appeal have an effect on student interest in using e-money, while perceptions of risk have no effect on student interest in using e-money.

**Keywords:** e-money, perceived usefulness, perceptions of risk, promotional appeal, interest in using

**JEL Classification:** E51, M31

### **PENDAHULUAN**

Alat pembayaran adalah media yang digunakan untuk

melakukan transaksi yang selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, dari sistem barter hingga sampai pada penggunaan alat pembayaran non tunai yang mulai banyak digunakan. Jenis alat pembayaran sendiri bisa dibagi menjadi tiga, yaitu alat pembayaran tunai (*cash based*) yang terdiri atas uang kertas dan uang logam, alat pembayaran non tunai yaitu alat pembayaran selain uang tunai seperti kartu kredit dan uang elektronik dan alat pembayaran internasional yang diperlukan untuk kegiatan ekspor impor karena setiap negara memiliki kurs dan mata uang yang berbeda. Pembayaran internasional dapat dilakukan dengan alat pembayaran tunai ataupun non tunai seperti wesel pos dan *cryptocurrency* (Badrudin dan Siregar, 2015). Alat pembayaran non tunai sendiri mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2007, pertama dikenalkan oleh Bank Central Asia (BCA) yang kemudian diikuti oleh bank lain. Alat pembayaran non tunai yang sedang marak digunakan adalah *e-money*, salah satunya adalah kartu e-money yang bisa didapat dengan membeli di minimart seperti Indomart atau Alfamart. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai hal seperti membayar tol dan transaksi di minimart yang berlogo *e-money*. Cara kerjanya sendiri sangat simpel, yaitu dengan menempelkan (*tap*) ke mesin saldo yang tersedia.

Saat ini penggunaan *e-money* adalah hal yang wajar dan dapat dilihat di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini juga bagian dari program Bank Indonesia yaitu Gerakan Nasional Non Tunai atau GNNT yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran non tunai untuk bertransaksi

(*cashless society*). Hal ini didukung dengan munculnya banyak *e-commerce* yaitu kegiatan jual beli secara online melalui media internet (Rahayu dan Badrudin, 2017).

Mewujudkan *cashless society* sendiri tidak serta merta dapat diterima masyarakat. Melansir dari kompas.com, survey yang dilakukan oleh Visa terhadap 500 responden mengenai metode pembayaran menunjukkan 95% responden masih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran meskipun 85% responden juga menggunakan kartu kredit dan debit serta 70% memakai *e-wallet* dan *e-money* juga. Hal ini menunjukkan masih adanya ketergantungan yang tinggi terhadap uang tunai. Preferensi masyarakat menggunakan tunai sebesar 40%, menggunakan kartu debit dan kredit sebesar 39%, menggunakan uang elektronik sebesar 18% dan nirkontrak sebesar 3%. Angka preferensi menggunakan uang non tunai sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya meskipun masih di bawah angka penggunaan uang tunai.

Perkembangan *e-money* di Indonesia sendiri selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2010 transaksi *e-money* sebesar 693 Miliar dan volume transaksinya 7.9 juta unit. Pada tahun 2019 total transaksi *e-money* sebesar 95 triliun dan volume transaksinya 257.1 juta unit dimana nilai transaksi mengalami peningkatan sebesar 137 kali lipat dan volumenya meningkat sebesar 31 kali lipat. Peningkatan

nilai transaksi dan volume transaksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Keuntungan dari menggunakan *e-money* sendiri menurut *centrausaha.com* ada banyak seperti menghindari uang palsu, banyak penawaran diskon, tidak perlu repot dengan uang kembalian, mengetahui dengan jelas nominal yang di transaksikan dan turut menjaga lingkungan karena tidak menggunakan kertas. *E-money* sendiri bukan tanpa kelemahan, beberapa kelemahan dari *e-money* yaitu mengisi ulang saldo cenderung terbatas, jika kartu *e-money* hilang berarti uang juga hilang dan rentan diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu pengguna *e-money* sendiri harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola uang elektroniknya.

Kota Semarang adalah salah satu kota besar yang terletak di Jawa Tengah sekaligus sebagai ibukota Jawa Tengah. Badrudin (2012) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan cara memudahkan metode pembayaran, tidak harus selalu menggunakan uang kartal. Kota Semarang sendiri memiliki populasi yang besar dan padat dan banyak fasilitas yang menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi. Masuknya ojek *online* di Semarang juga memberi warna baru terhadap penggunaan *e-money* di Kota Semarang sehingga menyebabkan peningkatan jumlah transaksi dan volume penggunaan *e-money* di Semarang yang dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 1**  
**Nilai Transaksi dan Volume Uang Elektronik**

Tahun	Nilai Transaksi (miliar rupiah)	Jumlah Uang Elektronik (juta unit)
2010	693	7.9
2011	981	14.3
2012	1.971	21.9
2013	2.907	36.2
2014	3.319	35.7
2015	5.283	41.9
2016	7.063	51.2
2017	12.375	90.0
2018	47.198	167.2
2019	95.743	257.1

Sumber: databoks.katadata.co.id

Tabel 2 menunjukkan peningkatan penggunaan *e-money* di Semarang. Pada tahun 2015, jumlah transaksi sebesar 5,3 juta dan volumenya 535 ribu unit. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dengan jumlah transaksi sebesar 145 Miliar dengan volume sebesar 5.3 ribu, dimana jumlah transaksi mengalami peningkatan sebanyak 27 kali lipat dan volume mengalami peningkatan sebesar 10 kali lipat.

**Tabel 2**  
**Nilai Transaksi dan Volume Uang Elektronik di Kota Semarang**

Tahun	Jumlah Transaksi (Juta Rupiah)	Volume (Ribu Unit)
2015	5.3	535
2016	7.1	683
2017	12.4	943
2018	47.2	2.992
2019	145.2	5.226

Sumber: bi.go.id

Kota Semarang memiliki beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang sehingga menarik minat calon mahasiswa untuk melanjutkan studinya di Kota Semarang. Dengan banyaknya mahasiswa di Semarang, maka permintaan untuk menggunakan *e-money* juga semakin meningkat seperti untuk membeli makan melalui ojek online dan belanja *online*, apalagi dengan adanya pandemi covid 19 yang memaksa mahasiswa untuk tinggal di kosan ataupun kontrakannya sehingga semakin meningkatkan minat menggunakan *e-money* dan belanja *online*.

Minat menggunakan *e-money* dapat diukur menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM sendiri adalah metode untuk mengukur apakah suatu teknologi baru bermanfaat dan mudah digunakan. Model TAM menjelaskan bahwa pengguna sistem cenderung menggunakan sistem apabila sistem tersebut bermanfaat dan mudah digunakan baginya. TAM pertama kali diperkenalkan oleh Davis *et al.* (1989). Menurut Davis *et al.* (1989), model TAM menggunakan dua konsep utama, yaitu persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*ease to use*). Selain persepsi manfaat dan kemudahan, masih ada beberapa variabel lain di dalam TAM. Beberapa

variabel dari TAM yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi manfaat, persepsi risiko dan daya tarik promosi dalam mempengaruhi minat menggunakan *e-money*.

Terdapat *research gap* atau perbedaan pendapat pada penelitian terdahulu. Variabel persepsi manfaat dinyatakan berpengaruh positif oleh penelitian Priambodo & Prabawani (2016) dan Adiyanti (2015), sedangkan Marchelina & Pratiwi (2016) menyatakan persepsi manfaat tidak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan *e-money*. Variabel persepsi risiko dinyatakan memiliki pengaruh positif berdasar penelitian Utami (2017) dan Marchelina & Pratiwi (2016), sedangkan penelitian Priambodo & Prabawani menyatakan bahwa persepsi risiko berpengaruh negatif. Variabel daya tarik promosi memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan *e-money* menurut Sari *et al.* (2020) dan Adiyanti (2015), sedangkan penelitian Zulkarnain (2017) menyatakan tidak berpengaruh positif. Adanya *research gap* antara penelitian terdahulu dan *research problem* terhadap faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan *e-money* mendasari penulisan ini.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Perilaku Konsumen

Menurut Kotler dan Keller (2009), perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana barang dan jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Prinsip dasar perilaku konsumen adalah 1) Pendapatan yang terbatas, sebelum melakukan kegiatan konsumsi, konsumen harus memikirkan cara agar tercipta pemasukan dan pengeluaran; 2) Membedakan biaya dan manfaat, jika ada 2 macam produk dengan manfaat yang lebih besar dan harga lebih murah maka konsumen akan memilih produk tersebut; dan 3) Hukum Gossen, semakin banyak jumlah yang dikonsumsi akan lebih sedikit kepuasan atau manfaat yang didapat.

### E-Money

Uang elektronik adalah alat bayar elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada penerbit baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit atau melalui bank dimana

nilai uang tersebut dikonversi menjadi nilai uang dalam media uang elektronik yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang digunakan untuk transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.

### Minat

Minat adalah ketertarikan pada suatu hal sesuai dengan perasaan individu sebagai sumber motivasi. Menurut Sudarsono (1995), faktor yang menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu 1) Faktor kebutuhan dari dalam yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan; 2) Faktor motif sosial yaitu pengakuan dari lingkungan sekitar; dan 3) Faktor emosional yaitu menaruh perhatian terhadap kegiatan atau objek tertentu

### Persepsi Manfaat

Jogiyanto (2007) mengartikan persepsi manfaat sebagai peningkatan kinerja seseorang dengan menggunakan suatu teknologi. Persepsi manfaat dapat dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu 1) *Work more quickly*, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat; 2) *Job performance*, dapat meningkatkan kinerja; 3) *Increase productivity*, meningkatkan output; 4) *Effectiveness*, meningkatkan keberhasilan dan meminimalkan kegagalan; 5) *Make job easier*, menjadikan pekerjaan sulit menjadi mudah diselesaikan; dan 6) *Useful*, bermanfaat untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

### Persepsi Risiko

Persepsi risiko adalah keputusan konsumen untuk memilih, menunda atau menghindari keputusan menggunakan suatu teknologi karena risiko yang dapat terjadi (Kotler, 2003). Beberapa indikator untuk mengukur persepsi risiko menurut Priambodo & Prabawani adalah 1) Adanya risiko tertentu; 2) Mengalami kerugian; dan 3) Pemikiran bahwa berisiko.

### Daya Tarik Promosi

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang penting dalam memasarkan produk. Faktor yang mempengaruhi yaitu sifat pasar, sifat produk, daur hidup produk dan dana yang tersedia.

### Technology Acceptance Model (TAM)

*Technology Acceptance Model* (TAM) adalah konsep untuk memeriksa model penerimaan teknologi

(Davis *et al.*, 1989). Tujuannya adalah menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi. Salah satu metodenya adalah TAM 3 yang membahas hubungan timbal balik mengapa seseorang menggunakan suatu teknologi. TAM 3 memiliki 17 variabel, variabel yang digunakan pada jurnal ini adalah *perceived usefulness* yang mendasari persepsi manfaat, *use behaviour* yaitu perilaku pengguna yang mendasari persepsi risiko dan *perception of external control* yaitu hal dari luar yang mendukung penggunaan teknologi mendasari daya tarik promosi.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Minat menggunakan *e-money* sebagai variabel dependen disimbolkan dengan Y, yaitu keinginan seseorang untuk menggunakan *e-money*; 2) Persepsi manfaat yaitu keuntungan yang diterima ketika menggunakan *e-money* yang disimbolkan dengan X1; 3) Persepsi risiko yaitu ketidakpastian dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari menggunakan *e-money* disimbolkan dengan X2; dan 4) Daya Tarik Promosi yaitu ketertarikan masyarakat untuk menggunakan *e-money* setelah mendengar promosi yang ditawarkan disimbolkan dengan X3.

Jenis data yang digunakan dari survey yaitu data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan menggunakan aplikasi *google form* dan *link* disebarakan melalui *whatsapp* dan *line*. Data yang dikumpulkan berjumlah 40 berasal dari jumlah variabel dikali 10, sehingga 4 variabel x 10 adalah 40 (Sugiyono, 2012). Metode yang digunakan adalah analisis linear berganda menggunakan *ordinary least square* (OLS). Metode perhitungan dan analisis regresi mengacu dari Winarno (2017). Persamaan regresinya adalah:

### Keterangan:

y	= Minat menggunakan <i>e-money</i>
$\alpha$	= Nilai konstanta
$\beta_{1,3}$	= Koefisien regresi dari X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> , dan X <sub>3</sub>
X <sub>1</sub>	= Persepsi Manfaat
X <sub>2</sub>	= Persepsi Kemudahan
X <sub>3</sub>	= Daya Tarik Promosi
e	= error (tingkat kesalahan)

### HASIL PENELITIAN

#### Deskripsi Data

Kuesioner yang dikumpulkan berjumlah 40 item dengan mayoritas responden berjenis kelamin perempuan

berjumlah 24 responden (60%) dengan rentang umur 21-23 tahun sebanyak 32 responden (80%) yang pengeluaran per bulannya sebanyak Rp 500.000 – 1.000.000 sebanyak 11 responden (27.5%). Lama menggunakan *e-money* didominasi 2-3 tahun dengan 16 responden (40%) yang banyak digunakan untuk membeli makan sebanyak 12 responden (30%).

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

Deteksi Normalitas untuk menguji residual berdistribusi normal atau tidak. Hasil pengujian adalah nilai Jarque-Bera sebesar 1.5151 dengan signifikansi sebesar  $0.4688 > 0.05$  yang berarti data berdistribusi secara normal. Deteksi Multikolinearitas untuk menguji korelasi antar variabel dimana semua variabel memiliki nilai VIF  $< 10$  sehingga tidak ada gejala multikolinearitas. Deteksi Heteroskedastisitas untuk mendeteksi apakah ada ketidaksamaan varian menggunakan uji Glejser dengan nilai sig seluruh variabel  $> 0.05$  sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas.

#### Uji Statistik Analisis Regresi

Nilai adj.  $R^2$  adalah 0.686 sehingga variabel independen dapat menerangkan variabel dependen sebesar 68.6% y dan sisanya 31.4% dipengaruhi oleh faktor di luar penelitian ini. Nilai signifikansi F-statistic adalah  $0.00 < 0.05$  sehingga variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

### PEMBAHASAN

#### Pengaruh Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan *E-Money*

Nilai koefisien regresi persepsi manfaat sebesar 0.701 yang berarti positif dengan signifikansi sebesar  $0.00 < 0.05$  yang menunjukkan hasil tersebut signifikan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi manfaat *e-money* maka semakin tinggi juga minat konsumen untuk menggunakan. Konsumen menggunakan *e-money* karena manfaat yang didapat seperti efisiensi waktu karena mudah menggunakan dan tempat karena tidak perlu membawa uang tunai yang berisiko mengundang kriminalitas dan memudahkan urusan transaksi sehari-hari.

#### Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan *E-Money*

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0.124 yang berarti negatif dengan signifikansi sebesar  $0.276 > 0.05$  yang berarti tidak signifikan. Persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan *e-money*. Konsumen menilai risiko bertransaksi tidak terlalu tinggi sehingga tidak khawatir untuk menggunakan *e-money*. Manfaat dari menggunakan *e-money* dan promosi yang ditawarkan juga lebih menarik minat mahasiswa sehingga mengabaikan risiko yang ada.

#### Pengaruh Daya Tarik Promosi Terhadap Minat Menggunakan *E-Money*

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.236 yang berarti positif dengan signifikansi sebesar  $0.036 < 0.05$  yang berarti signifikan. Hal tersebut terjadi karena promosi yang ditawarkan dengan menarik bisa merubah minat seseorang untuk menggunakan *e-money*. Promosi yang menarik dengan disertai promo akan lebih menarik minat seseorang.

### SIMPULAN DAN SARAN

Persepsi manfaat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan *e-money* yang artinya mahasiswa tertarik menggunakan *e-money* karena merasakan dan mendapat manfaat seperti mudah penggunaannya, praktis dalam membayar dan tidak perlu menerima kembalian. Daya tarik promosi juga memiliki pengaruh positif signifikan sehingga promosi dan keuntungan promosi akan sangat menarik mahasiswa untuk menggunakan *e-money*. Persepsi risiko tidak memiliki pengaruh terhadap minat menggunakan *e-money* dimana responden merasa risiko yang melekat pada *e-money* tidak masalah dan lebih tertarik oleh manfaat dan promosi yang ditawarkan sehingga mengabaikan risiko.

#### SARAN

Penelitian perlu dilakukan pada masa normal sehingga lebih mencerminkan minat untuk menggunakan *e-money*. Perlu digunakan data penggunaan jumlah rupiah untuk menunjukkan besar kecilnya jumlah yang dipakai dalam pembayaran *e-money*. Perlu diperbanyak kelompok respondennya agar lebih menggambarkan minat menggunakan *e-money*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, A. I. 2015. Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1): 4–6.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badrudin, Rudy dan Siregar, Baldric. 2015. The Evaluation of the Implementation of Regional Autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7(1).
- Bank Indonesia. 2018. Retrieved June 27, 2020, from Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik: <https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI-200618.aspx>.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. 1989. User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 982-1003.
- Jogiyanto, H. M. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Money.kompas.com. 2019. <https://money.kompas.com/read/2019/03/29/091700526/perilaku-pembayaran-konsumen-pilih-tunai-atau-non-tunai?page=all>.
- Kotler, Philip. 2003. *Manajemen Pemasaran*. Edisi kesebelas, Jakarta: Indeks kelompok Gramedia.
- Marchelina, D., & Pratiwi, R. 2016. Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko dan Fitur Layanan terhadap minat penggunaan e-money (Studi kasus pada pengguna e-money kota Palembang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1): 1–17.
- Priambodo, S., & Prabawani, B. 2016. Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang) Pendahuluan Kajian Teori Perilaku Konsumen. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 5(2): 1–9.
- Rahayu, E. N. Puji dan Badrudin, Rudy. 2017. Fiscal Decentralization Effect on Financial Performance: Mediated by Size and Moderated by Audit Opinion in Lampung Province. *Telaah Bisnis*, 18(2).
- Sari, M. A., Listiawati, R., Novitasari, N., & Vidyasari, R. 2020. Analisa Pengaruh Daya Tarik Promosi, Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, Persepsi Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Wallet. *Ekonomi & Bisnis*, 18(2): 126–134. <https://doi.org/10.32722/eb.v18i2.2493>
- Sudarsono. 1995. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, S. S. 2017. Faktor-Faktor yang Memoengaruhi Minat Penggunaan E-Money (Studi pada Mahasiswa STIE Ahmad Dahlan Jakarta). *Balance*, 14(2): 29–41.
- Winarno, Wing Wahyu., 2017, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan eViews*, edisi 5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Winarno, Wing Wahyu., 2019. *Menulis Karya Ilmiah dengan Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Zulqurnain, S. 2017. Pengaruh Daya Tarik Promosi, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Kemanfaatan Terhadap Minat Menggunakan E-Money. Skripsi.

# **PENGARUH KEPERIBADIAN *HARDINESS*, LINGKUNGAN KELUARGA, DAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA MANAJEMEN DI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

*Tri Adi Susanto*  
*Kusuma Chandra Kirana*  
*Didik Subiyanto*

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
*E-mail: [Triadisusanto369@gmail.com](mailto:Triadisusanto369@gmail.com)*

## **ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine the influence of hardinnes personality, family environment and entrepreneurship education towards the students interest of entrepreneurship in manajemen study program of University Sarjanawiyata Tamansiswa This research method is purposive sampling. The population in this study were 420 students of the Management study program, Faculty of Economics, Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta University class 2016-2017 with a research sample of 139 students. The data collection technique used a questionnaire, while the data analysis technique used the validity test, reliability test, descriptive statistics, classical assumption test, multiple linear test and the coefficient of determination. The results showed that (1) Hardinnes personality has a positive and significant effect on Entrepreneurial Interest; (2) Family Environment on Entrepreneurial Interest has a positive and significant effect; (3) Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Interest has a positive and significant effect; (4) Hardinnes personality, environment family and entrepreneurship education on interest in entrepreneurship have a positive and significant effect.

**Keywords:** hardinnes personality, family environment, entrepreneurship education, entrepreneurial interests

**JEL Classification:** L26

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan mempunyai kekayaan sumber daya manusia yang cukup banyak. Banyaknya sumber daya manusia di Indonesia harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan bagus. Apabila sumber daya manusia tidak diimbangi dengan baik maka akan menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah masalah pengangguran.

Pengangguran merupakan masalah yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi bagi negara Indonesia. Pengangguran disebabkan tidak seimbangnya lapangan pekerjaan dan tenaga kerja. Pengangguran dapat diartikan sebagai individu yang sedang berada pada usia kerja yang sedang tidak bekerja, dan sedang berusaha untuk mencari lapangan pekerjaan atau sedang bekerja, karena sesuatu hal maka harus diberhentikan dalam bekerja (Kosasih dan Sumarna 2013). Agustus 2018 jumlah pengangguran meningkat dari 7 juta orang menjadi 7,05 juta orang.

Dalam mengurangi pengangguran salah satu caranya adalah dengan menciptakan lapangan peker-



jaan atau dengan cara berwirausaha. Wirausaha adalah seorang yang mempunyai jiwa berani mengambil risiko untuk membuka sebuah usaha dalam berbagai kesempatan menjalankan suatu usaha. Berjiwa berani mengambil risiko dapat diartikan bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa cemas atau takut sekalipun dalam kondisi tidak pasti (Kasmir 2011: 19). Berdasarkan survei BPP HIPMI, 83% responden mahasiswa cenderung ingin menjadi karyawan. Sementara yang ingin menjadi wirausaha hanya 4%. Setelah lulus dan bergelar sarjana mereka justru sibuk mempersiapkan diri untuk melakukan berbagai tes yang diselenggarakan oleh para pemberi kerja baik dari instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Minat mahasiswa dalam terjun ke dunia wirausaha masih rendah, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak kepada mahasiswa agar setelah lulus tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, namun juga memikirkan bagaimana cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Jiwa kewirausahaan harus ditumbuhkan, salah satu caranya melalui Pendidikan Kewirausahaan yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa telah mendukung terciptanya wirausahawan muda yaitu dengan memasukan mata kuliah kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa jurusan manajemen. Hal ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa mempunyai jiwa untuk berwirausaha.

Dunia wirausaha sangat penting, karena semakin maju suatu negara semakin banyak orang yang terdidik semakin banyak pula orang menganggur. Kemampuan pemerintah yang terbatas dalam perkembangan pembangunan harus ditunjang dengan wirausahaan yang sanggup membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah tidak akan mampu menggarap keseluruhan aspek pembangunan disebabkan kebutuhan yang dibutuhkan sangat banyak seperti anggaran belanja, personalia, dan pengawasan. Jiwa kewirausahaan harus ditumbuhkan dengan menanamkan minat berwirausaha.

Minat Berwirausaha menurut Purwanto dalam Syaifudin (2016) adalah perbuatan yang dipusatkan pada tujuan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan atau perbuatan itu sendiri yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Minat yang timbul dari diri seseorang akan mendorong dirinya untuk mendalami

ilmu dan memfokuskan perhatiannya dalam kewirausahaan untuk membuktikan sesuatu yang dirasakan menarik oleh seseorang tersebut. Bygrave dalam Alma (2013: 9) mengatakan bahwa minat berwirausaha dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya 1) Faktor Personal, menyangkut aspek kepribadian. 2) Faktor *Environment*, menyangkut lingkungan fisik, dan 3) Faktor *Sociological*, menyangkut hubungan dengan keluarga.

Kepribadian *hardiness* merupakan kepribadian yang menunjukkan individu yang kuat, tangguh, setabil, optimis dalam menghadapitekanan dan dapat mengurangi efek negatif yang dihadapi (Kobasa, 1982). Menurut Lazarus & Folkam (1984), individu yang memiliki kepribadian *hardiness* mampu mengatasi tekanan yang dihadapinya dengan pemikiran positif. Sedangkan individu yang tidak memiliki kepribadian *hardiness* mengatasi masalah dengan lebih banyak pemikiran negatif. Kepribadian *hardiness* menurut Kobasa (1982) mempunyai tiga aspek yaitu, 1) Komitmen bertahan terhadap keputusan yang telah dipilih; 2) Kontrol dapat mengendalikan diri; dan 3) Tantangan menyukai hal untuk mendapatkan sebuah kesempatan. Penelitian Baskara & Has (2018) menunjukkan bahwa kepribadian berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha. Penelitian Andriyan (2018) menunjukkan kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

Lingkungan keluarga adalah lingkungan terdekat dan utama bagi individu hal yang terpenting terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan seluruh keluarga dekat lainnya. Menurut Semiawan dalam Syaifudin (2016), lingkungan keluarga merupakan peran utama yang dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak. Menurut Periera *et al.* (2017), dukungan dalam keluarga dapat bisa berbentuk secara emosional, memberikan informasi-informasi yang berguna, memberikan sebuah dukungan instrumental atau finansial. Dorongan orang tua dapat mempengaruhi anaknya dalam berwirausaha, maka anak akan cenderung berminat dan menentukan pilihannya sebagai wirausaha. Penelitian Saputra (2018) menunjukkan hasil lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Hasil penelitian Syaifudin (2016) juga menunjukkan hasil bahwa lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Penelitian sebelumnya oleh

Hafidah & Sukanti (2018) mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sudah memasukan kurikulum kewirausahaan dalam mata kuliah kewirausahaan akan meningkatkan minat berwirausaha dan mendukung mahasiswa yang akan berwirausaha. Menurut Mudyaharjo (2012: 11), pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan beberapa pihak seperti keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan untuk mempersiapkan peserta didik yang dapat memainkan peran dalam beberapa lingkungan hidup di masa mendatang yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah. Pendidikan kewirausahaan ialah sebuah proses pembelajaran untuk mengubah sikap dan pola pikir mahasiswa terhadap suatu pemilihan karir berwirausaha. Penelitian terdahulu mengenai pendidikan kewirausahaan seperti dari Nenchi (2019) menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Penelitian Rahmawati (2017) juga menunjukkan hasil bahwa pendidikan kewirausahaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kepribadian *Hardiness*, Lingkungan Keluarga, dan Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kuantitatif. Lokasi penelitian adalah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dengan populasi 420 mahasiswa dan sampel 139 mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah kewirausahaan. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu angket. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang telah disusun kepada responden yaitu mahasiswa Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu aplikasi SPSS Versi 21 yang mempunyai tujuan untuk menguji validitas instrumen dan reliabilitas instrumen.

Pengujian analisis data dalam penelitian ini meliputi uji normalitas yang berfungsi untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian mempunyai distribusi yang normal atau tidak, uji linearitas

digunakan untuk menguji membuktikan apakah dari antar variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau tidak dengan variabel terikat, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana dan untuk hipotesis 1, 2, dan 3 menggunakan persamaan regresi sederhana dan uji t. Sedangkan hipotesis 4 menggunakan analisis regresi berganda dengan cara membuat persamaan regresi berganda, uji F dan uji R.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasar Tabel 1, hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa tingkat  $\text{sig}$  sebesar  $0,904 > 0,05$  Hal ini dapat diartikan tingkat signifikansinya lebih dari  $0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Berdasar Tabel 2 nampak uji glejser heteroskedastisitas dinyatakan nilai signifikan variabel independen diatas  $>0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model ini.

Hasil uji Multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Berdasar hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Tolerance Value lebih dari sama dengan  $0,10$ , yaitu Kepribadian  $0,539$ , Lingkungan Keluarga  $0,635$ , dan Pendidikan Kewirausahaan  $0,588$ . Selain itu, semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari sama dengan  $10$ , yaitu variabel Kepribadian  $1,857$ , Lingkungan Keluarga  $1,574$ , dan Pendidikan Kewirausahaan  $1,702$ . Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

### Pengaruh Kepribadian *Hardiness* terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Manajemen

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Kepribadian *Hardiness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Untuk menguji hipotesis tersebut dilaku-

**Tabel 1**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,74207654
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,055
	Negative	-,057
Kolmogorov-Smirnov Z		,568
Asymp. Sig. (2-tailed)		,904

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer, diolah 2020

**Tabel 2**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	7,439	3,306		2,250	,027	
1	TX1	-,075	,063	-,132	-1,195	,235
	TX2	-,039	,039	-,102	-1,007	,317
	TX3	,080	,068	,130	1,185	,239

a. Dependent Variable: RES4

Sumber: Data Primer, diolah 2020

**Tabel 3**  
**Uji Uji Multikolonieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1	TX1	,539	1,857
	TX2	,635	1,574
	TX3	,588	1,702

Sumber: Data Primer, diolah

kan dengan analisis regresi linear sederhana sehingga diperoleh hasil analisis regresi linear sederhana seperti pada Tabel 4 berikut ini:

Berdasar Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa koefisien determinasi  $r^2$  0,540 yang berarti bahwa sebesar 54,0% kepribadian *hardiness* dipengaruhi oleh minat berwirausaha dan sisanya 45,0% dipengaruhi variabel lain. Uji t statistik untuk variabel Kepribadian menghasilkan t hitung sebesar 10,822. Berdasar hasil perhitungan diketahui bahwa t hitung > t tabel yaitu  $10,822 > 1,66055$ , dengan sig. sebesar 0,000/0,0. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kepribadian *Hardines* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berwirausaha mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

**Pengaruh Lingkungan keluarga terhadap Minat-Berwirausaha Mahasiswa Manajemen**

Hipotesis ke dua dalam penelitian ini ialah Lingkungan Keluarga sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program

Studi Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan analisis regresi linear sederhana sehingga diperoleh hasil analisis regresi linear sederhana seperti pada Tabel 5 berikut ini:

Berdasar Tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa koefisien determinasi  $r^2$  0,509 yang berarti bahwa sebesar 50,9% lingkungan keluarga dipengaruhi oleh minat berwirausaha dan sisanya 49,1% dipengaruhi variabel lain. Uji t statistik untuk variabel Kepribadian menghasilkan t hitung sebesar 10,717. Berdasar hasil perhitungan diketahui bahwa t hitung > t tabel yaitu  $10,717 > 1,66055$ . dengan sig. 0,000/0,00. Dapat disimpulkan bahwa variabel Lingkungan Keluarga sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berwirausaha mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

**Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Manajemen**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ialah pendidikan

**Tabel 4**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	6,326	2,421		2,614	,010
	TKH	,602	,056	,738	10,822	,000
R2 = ,540						

Dependent Variable: TMB

Sumber: Data Primer, diolah 2020

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Hipotesis 2**

**Coefficients<sup>a</sup>**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5,498	2,655		2,071	,041
	TLK	,480	,047	,717	10,175	,000
R2 = ,509						

Dependent Variable: TMB

Sumber: Data Primer, diolah

kewirausahaan sangat berpengaruh signifikan dan positif terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan analisis regresi linear sederhana sehingga diperoleh hasil analisis regresi linear sederhana seperti pada Tabel 6 berikut ini:

Berdasar Tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa koefisien determinasi  $r^2=0,519$  yang berarti bahwa sebesar 51,9% lingkungan keluarga dipengaruhi oleh minat berwirausaha dan sisanya 48,1% dipengaruhi variabel lain. Uji t statistik untuk variabel Kepribadian menghasilkan t hitung sebesar 10,388. Berdasar hasil perhitungan diketahui bahwa t hitung  $>$  t tabel yaitu  $10,388 > 1,66055$ , dengan sig. 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Dapat disimpulkan bahwa variabel Lingkungan Keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berwirausaha mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

**Pengaruh Kepribadian, Lingkungan Keluarga dan Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa**

Pada hasil uji signifikansi simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 93,851 dengan tingkat signifikansi

0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Kepribadian *Hardiness*, Lingkungan Keluarga, dan Pendidikan Kewirausahaan secara simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berwirausaha mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Kepribadian *hardiness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Dapat disimpulkan bahwa ketika kepribadian *hardiness* semakin meningkat maka minat berwirausaha semakin meningkat. Lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga semakin kondusif maka minat berwirausaha semakin meningkat. Pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan semakin berkualitas maka minat berwirausaha semakin meningkat.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Hipotesis 3**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,950	2,462		2,823	,006
	TLK	,783	,075	,724	10,388	,000
R2 =,519						

Dependent Variable: TMB  
Sumber: Data Primer, diolah

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Hipotesis 4**

	Model	F Hitung	Sig
1	Reggision	93,851	0,000
	Residual		
	Total		

Sumber: Data Primer, diolah

### Saran

Mahasiswa setelah lulus tidak hanya berfokus untuk mencari kerja, namun juga berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar bisa membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Orang tua merupakan pihak yang diharapkan dapat mendukung dan memotivasi anaknya untuk berwirausaha. Orang tua memiliki peran yang amat besar dalam menentukan aminat anak untuk berwirausaha. Perlu adanya peningkatan bagi pihak kampus dalam memberikan pemahaman dan pelatihan kepada mahasiswa agar berminat berwirausaha. Pihak kampus juga harus mendorong mahasiswa agar memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan untuk berwirausaha sebagai sarana untuk belajar terjun dalam dunia wirausaha.

Nurhadifah, S. N. & Sukanti, S. 2018. Pengaruh Kepribadian, Lingkungan Keluarga, Dan Teman Sebaya Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*. 16(2): 82-98.

Sudir, Nenchi. 2019. Pengaruh Pembelajaran Matakuliah Kewirausahaan dan *Self efficacy* Terhadap Minat Berwirausahaan. *Skripsi*. STIE YKPN.

Syaifudin, Achmad. 2017. Pengaruh Kepribadian, Lingkungan Keluarga, Dan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Profita Volume*, 5(8): 1-18.

### DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari. 2013. *Kewirausahaan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Andriyan, David. 2018. Minat Berwirausaha Ditinjau Dari Kepribadian Dan Lingkungan Keluarga Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS Angkatan 2015. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Baskara, A. & Has, Z. 2018. Pengaruh Motivasi, Kepribadian dan Lingkungan Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau (UIR). *PeKa: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP*, 6(1): 23-30.

Conny, Semiawan. 2010. *Pendidikan Keluarga Dalam Era Global*. Jakarta: PT. Preenhalindo.

Noviantoro, G. & Rahmawati, D. 2017. Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Motivasi Berwirausaha, Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(1): 65-77.

## **PENGARUH TIPE INDUSTRI TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN UKURAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

*Teguh Erawati*

*Revita Rati Nurohmah*

*E-mail: [eradimensiarch@gmail.com](mailto:eradimensiarch@gmail.com)*

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to examine the effect of industry type on corporate social responsibility (CSR) disclosure with the size of the board of commissioners as a variable moderating. This research was conducted at manufacturing companies listed on the IDX in 2016-2019. The population in this study amounted to 181 companies. The sample was selected using a purposive sampling method so that the sample size was 50 companies. The analysis technique used in data testing is Moderated Regression Analysis (MRA), and processed using the IBM SPSS 25 software. The results show that the type of industry has a positive and significant effect on disclosure of corporate social responsibility (CSR). In addition, the results of this study also found that the size of the board of commissioners did not moderate the relationship between industry type and corporate social responsibility disclosure.

**Keywords:** disclosure of corporate social responsibility, type of industry, size of the board of commissioners

**JEL classification:** M14, P23

### **PENDAHULUAN**

Sejarah perkembangan Akuntansi berkembang pesat

setelah revolusi industri, yang menyebabkan lebih banyak laporan akuntansi dilakukan seperti alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal (kapitalis), hal tersebut menyebabkan orientasi industri berpihak kepada *owner* modal. Keberpihakan industri kepada *owner* modal menyebabkan industri melakukan eksploitasi sumber daya alam serta masyarakat sosial secara tidak terkontrol sehingga menyebabkan kerusakan dan ketidakseimbangan alam, dan akhirnya akan mengganggu kehidupan manusia. Di dalam akuntansi konvensional fokus pelayanan kepada stockholders serta bondholders sebaliknya pihak yang lain seperti lingkungan disekitar perusahaan sering diabaikan. Saat ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak eksternal manajemen dan *capital owners*. Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) merupakan tanggung jawab suatu perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) dan / atau pihak-pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Adanya dampak dari aktivitas perusahaan telah member kesadaran kepada para pemilik modal bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bisa dikurangi sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang (Oktariani & Mimba, 2014).

Fenomena kasus di Indonesia yang terkait dengan permasalahan lingkungan dikarenakan perusahaan saat melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya, terutama perusahaan yang bergerak dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah kasus pembuan-

gan limbah ke sungai Citarum yang dilakukan oleh PT. Gistex tahun 2012. Limbah yang dibuang PT. Gistex di Citarum mengandung bahan kimia berbahaya beracun, termasuk nonylphenol, antimony, dan tributyl phosphate. Selain itu, air limbah yang dibuang dari salah satu pipa pembuangan yang lebih kecil bersifat sangat basa (pH 14). Kondisi pH yang sangat tinggi tersebut dapat menyebabkan luka bakar pada kulit manusia yang terkena kontak langsung, serta menimbulkan dampak parah (bahkan fatal) bagi kehidupan akuatik di sekitar pembuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa sama sekali tidak dilakukan penanganan, bahkan dalam tingkat yang paling dasar, terhadap limbah cair tersebut sebelum dibuang (<http://greenpeace.com>). Pentingnya pengungkapan kegiatan sosial perusahaan (*corporate social disclosure*) berkaitan dengan adanya perjanjian sosial (*contract social*). Kontrak antara perusahaan dan masyarakat (baik kontrak implisit maupun kontrak eksplisit) dihasilkan dari interaksi antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya, yang tidak hanya membuat perusahaan bertanggung jawab kepada stockholder (pemegang saham), tetapi juga memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Tipe Industri adalah karakteristik yang dimiliki suatu perusahaan terkait dengan ruang lingkup usahanya, karyawan, risiko bisnis dan lingkungan perusahaan (Silaen, 2013), Tipe industri terbagi menjadi dua kategori yaitu industri high-profile dan low-profile. Perusahaan yang termasuk dalam aktivitas yang dilakukan industri perusahaan yang bertipe high profile banyak melakukan memodifikasi lingkungan, menimbulkan dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat, atau secara luas terhadap stakeholders-nya (Ilene, 2016). Oleh karena itu membutuhkan pengungkapan CSR didalamnya. Penelitian sebelumnya terkait pengaruh tipe industry terhadap pengungkapan tanggungjawab social perusahaan (CSR) (Faidah et al., 2020; Frista & Fernando, 2020; Mandaika & Salim, 2017; Saputra, 2019; Utari & Irawati, 2019; A. F. Wicaksono, 2019) menyatakan bahwa tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. namun berbeda dengan penelitian (Ilene, 2016; Wighrayani, 2019) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena ketidakkonsistenan hasil ini, maka peneliti tertarik untuk menguji apakah tipe industry berpengaruh terhadap pengungkapan

tanggungjawab social perusahaan (CSR), selain itu peneliti juga menguji apakah ukuran dewan komisaris dapat memperkuat hubungan antara tipe industry terhadap pengungkapan tanggungjawab social perusahaan (CSR).

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Teori Legitimasi

Teori legitimasi mengacu pada keadaan mental seseorang atau sekelompok orang yang sangat peka terhadap gejala fisik dan non fisik lingkungan sekitarnya. (O'Donova, 2002 dalam Hadi, 2014) menyatakan pendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai apa yang masyarakat berikan kepada perusahaan, dan apa yang dicari atau diinginkan perusahaan dari masyarakat. Teori legitimasi menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dengan norma sosial yang berlaku saat ini dalam kegiatan usaha perusahaan. Suatu perusahaan melakukan kegiatan operasional dengan izin dari masyarakat, dan jika masyarakat menilai bahwa perusahaan tidak melakukan sesuatu sesuai dengan persyaratannya, izin tersebut dapat ditarik. (M. Putri & Sari, 2014). Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan strategi perusahaan, khususnya dalam upaya memposisikan diri dalam masyarakat yang semakin berkembang. Ketika perusahaan melakukan banyak kegiatan sosial, hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pihak lain dan membuat manfaat serta kemajuan tersendiri dari pihak perusahaan (Arief & Ardiyanto, 2014).

### Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara agent dan principal. Teori agensi adalah suatu hubungan yang timbul akibat adanya kontrak kepada pihak pemilik modal (*principal*) yang mendelegasikan pekerjaan dan agen (*agent*) sebagai pihak ) adalah pihak yang menerima titipan pekerjaan, artinya ada keterkaitan antara kepemilikan dan penguasaan perusahaan perusahaan (Dita Puspitasari & Putri Irjayanti, 2014). Principal berusaha untuk memaksimalkan laba (*risk takers*), sedangkan agent sebagai pelaksana aktivitas cenderung tidak menyukai resiko yang sangat besar (*risk adverse*). Untuk mengurangi konflik tersebut, maka principal perlu monitoring kinerja agent. Ber-



dasarkan teori keagenan, manajer berusaha mewujudkan kepentingan pemangku kepentingan dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya. Jika perusahaan yang diinvestasikan oleh pemangku kepentingan mengungkapkan pertanggung jawaban sosial, maka kepercayaan publik akan meningkat dan mereka akan puas (Premana, 2011). Munculnya teori agensi bertujuan untuk menyelesaikan konflik agensi dalam hubungan keagenan, untuk memenuhi kepentingan stakeholder, manajemen mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memenuhi tuntutan publik. Menurut teori keagenan, perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan yang lebih rendah dan biaya kontrak biasanya mengeluarkan biaya untuk tujuan manajemen, salah satunya adalah biaya untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Kemudian, sebagai bentuk tanggung jawab manajer yang bertindak sebagai agen, mereka akan berusaha untuk mewujudkan semua keinginan prinsipal, dalam hal ini informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan harus diungkapkan (Dita Puspitasari & Putri Irjayanti, 2014).

#### **Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)**

Pengungkapan tanggung jawab adalah data yang diungkapkan oleh perusahaan tentang kegiatan sosialnya (R. K. Putri, 2017). Pengungkapan tanggung jawab merupakan data yang diungkap oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya (R. K. Putri, 2017). Konsep triple bottom line merupakan konsep pengukuran kinerja perusahaan yang tidak hanya mencakup pengukuran kinerja ekonomi dalam bentuk laba, tetapi juga mencakup pengukuran perhatian sosial dan metode perlindungan lingkungan. Selain mengejar laba, perusahaan juga harus berperan dalam menjaga lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Dengan memperhatikan ekspektasi stakeholders, kita dapat mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mematuhi hukum yang berlaku dan kode etik internasional, serta mewujudkan tanggung jawab sosial berupa perilaku transparan dan etis (Sudana, 2015). Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui berbagai media merupakan wujud akuntabilitas kepada stakeholders dan menjaga reputasi.

#### **Tipe Industri**

Tipe Industri adalah karakteristik perusahaan berkaitan dengan ruang lingkup bisnis, risiko bisnis, karyawan dan lingkungan perusahaan (Silaen, 2013). Dalam hal ini Permatasari & Prasetiono (2014) menggambarkan industri yang high-profile sebagai perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan (*consumer visibility*), risiko politik yang tinggi atau kompetisi yang ketat dibandingkan dengan industri *low profile* yang memiliki tingkat visibilitas konsumen, risiko politik dan tingkat persaingan sehingga ketika terjadi kesalahan ataupun kegagalan produksi tidak terlalu menarik perhatian publik. Tipe industri terdiri dari 2 macam yaitu industri *high-profile* dan industri *low-profile*. (Sembiring, 2006) memasukan perusahaan minyak dan pertambangan, kehutanan, mobil, kertas, kimia, penerbangan, tembakau dan rokok, energi (listrik), makanan dan minuman, perusahaan media dan komunikasi, agribisnis, teknik sanitasi, transportasi dan pariwisata sebagai perusahaan yang *high-profile*. Sedangkan pemasok peralatan medis, real estat, pengecer, tekstil dan produk tekstil, produk pribadi, dan produk rumah tangga sebagai perusahaan yang *low-profile*.

#### **Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan dewan yang bertugas untuk mengawasi, meninjau dan menyetujui keputusan manajemen atau dewan direksi. Hal ini membuat dewan komisaris mempunyai wewenang yang tinggi terhadap setiap keputusan yang diambil untuk kemajuan perusahaan. Dengan begitu, semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin mudah pula untuk mengendalikan CEO dan pengawasan akan semakin efektif (Hayuningtyas, 2007). Apabila CEO lebih terkendali, dewan komisaris secara tidak langsung dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi CEO untuk mendukung pembangunan berkelanjutan perusahaan. Dewan komisaris, sebagai mekanisme kontrol internal tertinggi dan bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku manajemen puncak untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Hal ini terutama terjadi jika dewan pengawas memahami dan mengakui pentingnya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan perusahaan.

### **Hubungan antara Tipe Industri terhadap Pengungkapan CSR**

Tipe Industri adalah karakteristik perusahaan berkaitan dengan ruang lingkup bisnis, risiko bisnis, karyawan dan lingkungan perusahaan (Silaen, 2013). Ada dua macam tipe industri yaitu industri *high-profile* dan industri *low-profile*. Dalam hal ini Permatasari & Prasetyono (2014) menggambarkan industri yang *high-profile* sebagai perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan (*consumer visibility*), risiko politik yang tinggi atau kompetisi yang ketat serta lebih mendapat perhatian public sehingga memerlukan pengungkapan tanggungjawab social yang lebih luas sedangkan Industri *low profile* memiliki tingkat visibilitas konsumen, risiko politik dan tingkat persaingan yang rendah.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan izin dari masyarakat, dan jika masyarakat berpendapat bahwa perusahaan belum melakukan tindakan sesuai dengan persyaratannya, izin tersebut dapat dicabut. Hal ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat dan sejalan dengan norma sosial yang berlaku saat ini dalam kegiatan usaha perusahaan (M. Putri & Sari, 2014). Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan strategi perusahaan, khususnya dalam upaya memposisikan diri dalam masyarakat yang semakin berkembang. Ketika perusahaan melakukan banyak kegiatan social, hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pihak lain dan membuat manfaat serta kemajuan tersendiri dari pihak perusahaan (Arief & Ardiyanto, 2014) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Faidah *et al.*, 2020; Frista & Fernando, 2020; Mandaika & Salim, 2017; Saputra, 2019; Utari & Irawati, 2019; A. F. Wicaksono, 2019) menyatakan bahwa ada pengaruh tipe industri terhadap luas pengungkapan CSR. Berdasar hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H1:** Tipe Industri berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Taggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)

**Hubungan antara Tipe Industri dan Pengungkapan Taggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) dengan Ukuran Dewan Komisas sebagai variabel Moderasi**  
Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah anggota

dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Leksone & Butar, 2018). Dewan komisaris merupakan dewan yang bertugas untuk mengawasi, meninjau dan menyetujui keputusan manajemen atau dewan direksi. Hal ini membuat dewan komisaris mempunyai wewenang yang tinggi terhadap setiap keputusan yang diambil untuk kemajuan perusahaan, sehingga semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin mudah pula untuk mengendalikan CEO dan pengawasan akan semakin efektif (Hayuningtyas, 2007). Tipe Industri adalah karakteristik perusahaan berkaitan dengan ruang lingkup bisnis, risiko bisnis, karyawan dan lingkungan perusahaan (Silaen, 2013).

Dalam hal ini Permatasari & Prasetyono (2014) menggambarkan industri yang *high-profile* sebagai perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan (*consumer visibility*), risiko politik yang tinggi atau kompetisi yang ketat serta lebih mendapat perhatian publik sehingga memerlukan pengungkapan tanggungjawab social yang lebih luas bila dibandingkan dengan industri *low profile*. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara principal (dewan komisaris) dan agen (manajer) (Jensen & Meckling, 1976).

Menurut teori keagenan, teori tersebut menyatakan bahwa dewan komisaris dapat mengakses informasi internal perusahaan, sedangkan manajer sebagai peserta dalam praktik operasional perusahaan dapat memperoleh informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan yang benar dan komprehensif. Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap orang dimotivasi oleh kepentingannya sendiri, yang menyebabkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Dewan komisaris sebagai wakil perusahaan, selain berusaha untuk memaksimalkan laba, mereka juga berusaha meningkatkan performa jangka panjang atau keberlanjutan perusahaan (*risk takers*), sedangkan manajer sebagai pelaksana aktivitas cenderung tidak menyukai resiko yang sangat besar (*risk adverse*) karena manajer cenderung akan berbuat sesuai dengan kepentingan mereka, salah satunya dengan meningkatkan kinerja jangka pendek perusahaan sehingga mendapatkan bonus atas capaian prestasi mereka.

Untuk mengurangi konflik tersebut, maka principal (dewan komisaris) perlu *monitoring* kinerja agent (manajer) (Premana, 2011). Manajer berpandangan bahwa untuk meningkatkan kinerja mereka

agar terlihat bagus harus meninggalkan aktivitas yang kurang memberikan dampak secara langsung dalam jangka waktu pendek karena pembiayaan tersebut dapat menurunkan hasil kinerja mereka saat itu. Salah satu aktivitas tersebut adalah kegiatan CSR, dana investasi CSR menurut para manajer tidak memberikan dampak secara langsung dalam jangka waktu pendek untuk keuntungan perusahaan (Rizky & Yuyetta, 2015). Sedangkan dewan komisaris sebaliknya mereka menganggap bahwa kegiatan CSR merupakan investasi jangka panjang dan menjadi sebuah strategi dalam keberlanjutan operasional perusahaan di masa mendatang. Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut maka diperlukan pengendalian dan pengawasan dari dewan komisaris terhadap manajer. Ketika ukuran dewan komisaris lebih besar maka pengendalian dan pengawasan manajer akan semakin mudah dan efektif. Dewan komisaris akan lebih meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan di perusahaan high profile dibandingkan perusahaan low profile, karena memiliki kepekaan lingkungan yang lebih tinggi (visibilitas konsumen), risiko politik yang lebih tinggi atau persaingan yang ketat, dan mendapatkan lebih banyak perhatian publik, sehingga perusahaan melakukan pengungkapan CSR lebih luas sebagai investasi dan strategi perusahaan dalam meningkatkan performance dan keberlanjutan operasional di masa mendatang.

Hasil penelitian (Chelsya, 2018; I Gusti Agung Arista Pradnyani & Eka Ardhani Sisdyani, 2015) me-

nyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian (Faidah *et al.*, 2020; Frista & Fernando, 2020; Mandaika & Salim, 2017; Saputra, 2019; Utari & Irawati, 2019; A. F. Wicaksono, 2019) juga menyatakan bahwa ada hubungan antara tipe industri terhadap luas pengungkapan CSR. Berdasar hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

**H2:** Ukuran Dewan Komisaris memperkuat Hubungan antara Tipe Industri terhadap Pengungkapan CSR

Penelitian ini merupakan penelitian dengan data sekunder. Metode penelitian ini adalah metode kausal dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016b, hlm. 56) metode kausal berarti hubungan yang bersifat sebab-akibat, ketika ada variabel yang mempengaruhi (independen) dan variabel yang dipengaruhi (dependen). Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara memperoleh data berupa angka ekstrapolasi atau data kualitatif yang dibuat menjadi angka (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 181 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga jumlah sampel sebanyak 50 yang diunduh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

**Tabel 1**  
**Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019	181
2.	Perusahaan tidak mempublikasikan annual report selama tahun 2016-2019	(64)
3.	Perusahaan tidak menyajikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember	(25)
4.	Perusahaan mengalami kerugian selama tahun 2016-2019	(30)
5.	Perusahaan tidak menggunakan satuan nilai rupiah pada laporan keuangan selama 2016 – 2019	(4)
6.	Perusahaan tidak memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia ( <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> )	(5)
Jumlah Sampel		200

**Pengungkapan CSR**

Pengungkapan tanggung jawab merupakan data yang diungkap oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya (R. K. Putri, 2017). Pengungkapan CSR di penelitian ini diproksikan menggunakan rasio pengungkapan CSR atau CSR *dislosure*. CSRD dihitung berdasarkan jumlah pengungkapan perusahaan dibagi dengan 91 indikator berdasarkan GRI-G4.

**Tabel 2**  
**Indeks GRI G4 91**

Indikator	Jumlah Item
Ekonomi	9
Lingkungan	34
Sosial yang terdiri dari:	
a. Tenaga Kerja	16
b. Hak Asasi Manusia	12
c. Masyarakat Sosial	11
d. Tanggung Jawab Produk	9
Jumlah	91

**Sumber:** *Global Reporting Initiative*

Pengukuran ini dilakukan dengan cara mencocokkan item-item yang ada dalam daftar dengan item-item yang diungkapkan oleh perusahaan. Pendekatan untuk menghitung pengungkapan CSR dilakukan dengan cara tabulasi menggunakan variabel *dummy* yaitu:

- a. Skor 0: Jika setiap item pengungkapan CSR dalam instrumen penelitian tidak diungkapkan.
- b. Skor 1: Jika setiap item pengungkapan CSR dalam instrumen penelitian diungkapkan

Setelah mengidentifikasi item diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dan mencocokkannya dengan checklist, hasil pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRD<sub>i</sub>. Selain itu, nilai total yang diungkapkan perusahaan digunakan untuk mengukur indeks tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan W. N. Sari & Rani (2016) Rumus yang digunakan untuk mengukur indeks pengungkapan tanggung jawab social adalah sebagai berikut:

$$CSR_i = \frac{\sum(K_{Ei} + K_{Li} + K_{Si})}{\sum \text{indeks GRI 91}}$$

Keterangan :

$\sum$  indeks GRI adalah jumlah item pengungkapan CSR menurut GRI

CSR<sub>i</sub> : Indeks Pengungkapan CSR

$\sum(K_{Ei} + K_{Li} + K_{Si})$  : Jumlah item CSR yang diungkapkan oleh perusahaan

K<sub>Ei</sub> : indikator kinerja ekonomi yang diungkapkan

K<sub>Li</sub> : indikator kinerja lingkungan yang diungkapkan

K<sub>Si</sub> : indikator kinerja sosial yang diungkapkan

**Tipe Industri**

Tipe Industri adalah karakteristik perusahaan berkaitan dengan ruang lingkup bisnis, risiko bisnis, karyawan dan lingkungan perusahaan (Silaen, 2013). Sembiring (2006) memasukan perusahaan perminyakan dan pertambangan, hutan, otomotif, kertas, kimia, penerbangan, tembakau dan rokok, energi (listrik), makanan dan minuman, media dan komunikasi, agribisnis, teknik sanitasi, transportasi dan pariwisata sebagai perusahaan yang high-profile. Sedangkan pemasok peralatan medis, real estat, pengecer, tekstil dan produk tekstil, produk pribadi, dan produk rumah tangga sebagai perusahaan yang low-profile. Tipe industri dalam penelitian ini diukur menggunakan variable dummy yaitu dengan member skor 1 jika perusahaan termasuk dalam industri *high-profile* dan skor 0 jika perusahaan tergolong dalam industri *low-profile* (Sembiring, 2006).

**Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Leksono & Butar, 2018). Alat ukur ukuran dewan komisaris yaitu:

$$DK = \sum \text{Anggota Dewan Komisaris (Leksono \& Butar, 2018)}$$

**HASIL PENELITIAN**

Berdasar Tabel 3, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap pengungkapan CSR (CSRD) dengan melihat jumlah item pengungkapan CSR (CSRD) yang dilakukan perusahaan, menunjukkan nilai minimum sebesar 0,11, nilai maksimum sebesar 0,24 dengan rata-rata sebesar 0,1704 dan standar deviasi sebesar 0,02732. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap tipe industri

(TYPE) dengan melihat pengelompokkan perusahaan yang termasuk dalam industri high-profile dan low-profile, menunjukkan nilai minimum sebesar -0,12 nilai maksimum sebesar 1,00 dengan rata-rata sebesar 0,6325 dan standar deviasi 0,44794. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap ukuran dewan komisaris (DK) dengan melihat jumlah dewan komisaris dalam annual report perusahaan, menunjuk-

kan nilai minimum sebesar 1,29 nilai maksimum sebesar 7,64 dengan rata-rata sebesar 3,9160 dan standar deviasi 1,72650.

Berdasar Tabel 4 diketahui nilai probabilitas p atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,074. Karena nilai probabilitas p 0,200 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

**Tabel 3**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSRD (Y)	199	.11	.24	.1704	.02732
TYPE (X)	199	-.12	1.00	.6325	.44794
DK (Z)	199	1.29	7.64	3.9160	1.72650
Valid N (listwise)	199				

Sumber: Output SPSS 25, data diolah

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		199
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0001
	Std. Deviation	.02206
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.029
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS 25, data diolah

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.167	.005		32.092	.000		
TYPE (X)	.009	.004	.151	2.114	.036	.973	1.028
DK (Z)	-.001	.001	-.034	-.470	.639	.973	1.028

a. Dependent Variable: CSRD (Y)

Sumber: Output SPSS 25, data diolah

Berdasar Tabel 5 diketahui nilai *Tolerance* TYPE adalah 0,973, dan nilai *Tolerance* DK adalah 0,973. Seluruh nilai *Tolerance* dari masing-masing variabel bebas tidak kurang dari 0,1, maka diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan nilai VIF TYPE adalah 1,028, dan nilai VIF DK adalah 1,028. Karena seluruh nilai VIF dari masing-masing variabel bebas juga tidak lebih dari 10, maka diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.

Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar diatas

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka data penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji heteroskedastisitas glejster

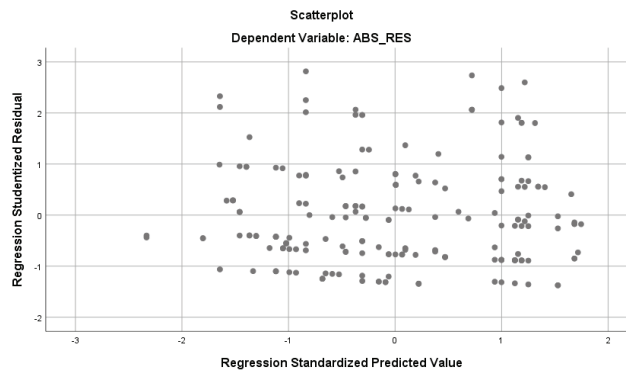
Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen, terlihat dari probabilitas signifikan lebih tinggi dari kepercayaan 5%. Sehingga dalam model regresi tidak dapat indikasi adanya Heterokedastisitas.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Glejser**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.024	.003		7.592	.000
TYPE (X)	.002	.003	.060	.839	.402
DK (Z)	-.001	.001	-.094	-1.310	.192

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber : Output SPSS 25, data sekunder diolah 2020



Sumber: Output SPSS 25, data diolah

**Gambar 1**  
**Scatterplot**

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.150 <sup>a</sup>	.022	.012	.02715	2.011

a. Predictors: (Constant), DK (Z), TYPE (X)

b. Dependent Variable: CSRD (Y)

Sumber: Output SPSS 25, data diolah

Berdasar Tabel 7, nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 2,011. Syarat uji autokorelasi adalah  $du < d < 4-du$ , nilai statistik Durbin-Watson terletak di antara  $1,8094 < 2,011 < 2,1906$

Berdasar uraian tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.

Perhitungan uji t melalui program SPSS versi 25, variabel TYPE telah ditunjukkan nilai t hitung 2,068 dan mendapatkan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,40. Hasil tabel dengan menghitung derajat kebebasan  $df = n - k - 1$  atau  $df = 199 - 1 - 1 = 198$ , t tabel menunjukkan nilai t tabel 1,972. Ditarik kesimpulan pengambilan keputusan bahwa t hitung >

t table ( $2,068 > 1,972$ ) dan nilai Sig 0,40 ( $0,40 < 0,05$ ), disimpulkan bahwa TYPE berpengaruh secara parsial terhadap CSRD.

Persamaan Uji MRA

$$CSRSD = \alpha + \beta_1TYPE + \beta_2DK + \beta_3TYPE*DK + \epsilon$$

Keterangan:

CSRSD = Pengungkapan CSR

$\alpha$  = konstanta atau *intercept*

$\beta$  = koefisien variabel independen

TYPE = Tipe Industri

DK = Ukuran Dewan Komisaris

$\beta_3$  = interaksi

$\epsilon$  = error

**Tabel 8**  
**Hasil Uji T**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.165	.003		49.497	.000
TYPE (X)	.009	.004	.146	2.068	.040

a. Dependent Variable: CSRSD (Y)

**Tabel 9**  
**Hasil Uji MRA**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.166	.010		16.552	.000
TYPE (X)	.010	.012	.170	.839	.403
DK (Z)	.000	.003	-.018	-.105	.917
INTERAKSI	.000	.003	-.027	-.098	.922

a. Dependent Variable: CSRSD (Y)

Berdasar Table 9, didapatkan rumus persamaan regresi sebagai berikut :

$$CSRSD = 0,166 + 0,010 TYPE + 0,000 DK + 0,000TYPE*DK + \epsilon$$

Hasil Tabel 9 menunjukkan bahwa secara individu variable TYPE (X) nilai koefisien 0,010 dengan probabilitas signifikansi 0,403. Variable DK (Z) nilai koefisien 0,000 dengan probabilitas signifikansi 0,917. Interaksi variable TYPE (X)\* DK (Z) nilai koefisien

0,000 dengan probabilitas signifikansi 0,922 tidak mempengaruhi pengungkapan CSR.

Hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,007 atau 0,07%. Berdasar hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable TYPE (X), DK (Z), dan TYPE (X) \* DK (Z) hanya mampu memprediksi variabel CSRSD sebesar 0,10%, sedangkan 99,93% dipengaruhi oleh factor lain di luar penelitian ini

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Tipe Industri Terhadap Pengungkapan CSR

Berdasar analisis dan pengujian data yang dilakukan dalam penelitian ini antara variabel Tipe Industri terhadap Pengungkapan CSR dengan koefisiensi regresi sebesar 0,09 kearah positif, hal ini menunjukkan Tipe Industri memiliki pengaruh positif terhadap CSR, sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,040 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan H1 yang menyatakan bahwa Tipe industry berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR terdukung. Artinya perusahaan dengan tipe *high profile* akan membuat pengungkapan CSR yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang tergolong *low profile*.

Hal ini karena perusahaan yang tergolong sebagai industry *high profile* memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap lingkungan (*consumer visibility*), risiko politik yang tinggi atau kompetisi yang ketat serta lebih mendapat perhatian dari public sehingga mendorong perusahaan high profile untuk lebih banyak melakukan kegiatan CSR yang kemudian diungkap dalam *annual report* perusahaan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan transparansi kepada publik sehingga kepercayaan stakeholder dan reputasi perusahaan semakin tinggi, dibandingkan dengan industry *low profile* yang memiliki tingkat visibilitas konsumen, risiko politik, dan tingkat persaingan serta perhatian public yang lebih rendah.

Kegiatan CSR juga digunakan sebagai strategi perusahaan dalam investasi jangka panjang untuk meningkatkan *performance* serta keberlanjutan operasional di masa mendatang. Hal ini terdukung oleh teori legitimasi yang menyatakan bahwa suatu perusahaan melakukan kegiatan operasional dengan izin dari masyarakat, dan jika masyarakat menilai bahwa perusahaan tidak melakukan sesuatu sesuai dengan persyaratannya, izin tersebut dapat ditarik (Utari & Irawati, 2019). Hal ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat dan sejalan dengan norma sosial yang berlaku saat ini dalam kegiatan usaha perusahaan (M. Putri & Sari, 2014).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh (Faidah *et al.*, 2020; Frista

& Fernando, 2020; Mandaika & Salim, 2017; Saputra, 2019; Utari & Irawati, 2019; A. F. Wicaksono, 2019) yang menyatakan bahwa Tipe Industri berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Ilene, 2016; Wigrhayani, 2019) yang menyatakan bahwa tipe industry tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR masa mendatang.

### Pengaruh Tipe Industri Terhadap Pengungkapan CSR Dengan Dimoderasi Oleh Ukuran Dewan Komisaris

Variable tipe industri dengan dimoderasi oleh ukuran dewan komisaris memiliki koefisien regresi sebesar 0,000 yang menunjukkan arah negatif dan signifikansi 0,922 yang berarti di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ukuran dewan komisaris memperkuat hubungan antara tipe industry terhadap pengungkapan CSR tidak terdukung. Hal ini berarti ukuran dewan komisaris tidak memoderasi pengaruh positif tipe industri terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan dengan tipe *high profile* dapat mempengaruhi pengungkapan CSR dibandingkan perusahaan dengan tipe *low profile*, namun adanya dewan komisaris yang lebih banyak tidak mendukung hubungan tersebut.

Hasil penelitian ini tidak mendukung Teori agensi yang menyatakan Manajer memiliki pandangan bahwa untuk meningkatkan kinerja mereka agar terlihat bagus harus meninggalkan aktivitas yang kurang memberikan dampak secara langsung dalam jangka waktu pendek karena pembiayaan tersebut dapat menurunkan hasil kinerja mereka saat itu yang salah satunya adalah kegiatan CSR. Sedangkan dewan komisaris sebaliknya mereka menganggap bahwa kegiatan CSR merupakan investasi jangka panjang dan menjadi sebuah strategi dalam keberlanjutan operasional perusahaan di masa mendatang. Hal ini terjadi karena Dewan Komisaris merupakan wakil pemegang saham perusahaan dan fungsinya mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Sebagai perwakilan pemegang saham, Dewan Komisaris akan merumuskan kebijakan penggunaan keuntungan perusahaan untuk kegiatan usaha perusahaan yang lebih menguntungkan daripada kegiatan sosial..



## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan CSR dengan ukuran dewan komisaris sebagai variable moderating. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, dan menghasilkan sampel akhir sebanyak 50 perusahaan dengan total data 200 namun karena telah dilakukannya metode penyembuhan gejala autokorelasi yaitu chocrane orchutt maka total data menjadi 199. Teknik analisis menggunakan MRA (*Moderated Regression Analysis*) dengan alat bantu SPSS 25. Berdasar hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Variabel Tipe Industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 dan 2) Ukuran Dewan Komisaris tidak memoderasi hubungan antara variabel Tipe Industri terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

### Saran

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan, maka beberapa saran diberikan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam penelitian selanjutnya sebagai berikut 1) Menambah variabel lain yang berkaitan erat secara teori terhadap pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) sehingga hasil penelitian terus berkembang dan semakin mampu memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) dan 2) Memperluas ruang lingkup penelitian, dengan memperpanjang tahun penelitian dan menambah jumlah sampel dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor perusahaan agar hasil penelitian dapat diperluas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., & Ardiyanto, M. D. 2014. Pengaruh Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Non Keuangan dan Jasa yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3): 102–110.
- Chelsya. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 23(1): 141–153. <https://doi.org/10.24912/je.v23i1.339>.
- Dita Puspitasari, & Putri Irjayanti. 2014. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Umur Perusahaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*.
- Faidah, A., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. 2020. Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 09(02): 47–57.
- Frista, F., & Fernando, K. 2020. The Effect of Internationalization, Industrial Type, and Company Size on Corporate Social Responsibility Disclosure. *Jurnal Siasat Bisnis*, 24(2): 138–147. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol24.iss2.art4>.
- Hadi, N. 2014. *Corporate social responsibility*. Graha Ilmu.
- Hayuningtyas, P. 2007. *Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Universitas Sebelas Maret.
- <http://greenpeace.com>. (n.d.).

- I Gusti Agung Arista Pradnyani, & Eka Ardhani Sisyani. 2015. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Dewan Komisaris Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2): 384–397.
- Ilene. 2016. Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Regulasi Pemerintah, Metode Dan Gaya Komunikasi, Performance Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Media Riset Akuntansi*, 6(2): 61–86.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *The Journal of Financial Economics*.
- Leksono, A. A., & Butar, S. B. 2018. Pengaruh Good Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1): 2541–5204. <https://doi.org/10.24167/jab.v16i2.1696>
- Mandaika, Y., & Salim, H. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, Tipe Industri, dan Financial Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi*, 2: 181–201.
- Oktariani, N. W., & Mimba, N. P. S. H. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tanggung Jawab Lingkungan pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3: 402–418.
- Permatasari, H. D., & Prasetiono, H. 2014. Pengaruh Leverage, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2012). *Journal of Management*, 4: 1–9.
- Premana, A. B. 2011. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur Pada Bursa Efek Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Putri, M., & Sari, Y. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Coporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(1): 80–91.
- Putri, R. K. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Basis Kepemilikan Terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Tahun 2012-2014. *JOM Fekon*, 4(1): 558–571.
- Rizky, Z., & Yuyetta, E. N. A. 2015. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Pemerintah, Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Pemerintah, Daya Saing Industri, serta Profitabilitas Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Journal of Accounting*, 4(1): 1–10. <https://doi.org/http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Saputra, S. E. 2019. Pengaruh Kepemilikan Instiusional, Kepemilikan Publik, Pertumbuhan Perusahaan Dan Tipe Industri Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan High Profile di Bursa Efek Indonesia. *Journal of RESIDU*, 3(18): 138–149.
- Sari, W. N., & Rani, P. 2016. Pengaruh Kepemilikan Instiusional, Kepemilikan Manajerial, Return On Assets (ROA) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1).
- Sembiring, E. 2006. Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta. *Maksi*, 6.

Silaen, B. M. 2013. Analisis Pengaruh Size Perusahaan, Tipe Industri, Basis Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Tingkat Pengungkapan Sosial Pada Perusahaan Yang Go Public di BEI 2010. *Jurnal Akuntansiku*, 1(1).

Sudana, I. M. 2015. *Manajemen Keuangan Perusahaan* (2nd ed.). Erlangga.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Utari, S., & Irawati, Z. 2019. Analisis Pengaruh Firm Size, Tipe Industri, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Urecol*, 46–54.

Wicaksono, A. F. 2001. Pengaruh Tekanan Publik Terhadap Pengungkapan Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(2): 1–12.

Wighrayani, N. N. S. W. 2019. Pengaruh Kebijakan Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi E-ISSN: 2460-0585*, 8, 22.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). (n.d.).

## **MODEL BISNIS KONTRAK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PROYEK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UMBULAN**

*Andriyani*  
*Dini Rosdini*  
*Harry Suharman*

Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran  
*E-mail: [andriyanikamil@gmail.com](mailto:andriyanikamil@gmail.com)*

### **ABSTRACT**

The research objective is to determine the business model of the Umbulan SPAM Project with the PPP scheme, to find out the obstacles, opportunities and projections for the success of the Umbulan SPAM Project. This research uses qualitative methods. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviewing sources related to the Umbulan SPAM Project from the Ministry of PUPR, Ministry of Finance, and East Java Provincial Government. Secondary data was obtained from library data through literature studies and document related to the Umbulan SPAM project. The result of the research is that the Umbulan SPAM Project business model is carried out by the government and business entities that are validated through a contract with the scope of work of the business entity to build project infrastructure based on minimum service standards by the government so that the quality of community services remains an important priority in the existing business model, constraints what appeared in the implementation of the Umbulan SPAM Project was quite hindering but could be overcome and the opportunities the Umbulan SPAM Project had could encourage the success of the project. The government infrastructure project business model with the PPP contract scheme, although it involves the private sector

in its implementation, the priority of public services remains important without leaving financial benefits also for the private sector. The PPP scheme is a good alternative choice for financing schemes for water supply infrastructure projects for the community.

**Keywords:** public private partnership, business contracts, drinking water supply, project

**JEL Classification:** H42

### **PENDAHULUAN**

Air adalah salah satu sumber kekayaan negara. Keberadaan air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. *UN Document "The Dublin Statement of Water and Sustainable Development"* atau dikenal dengan *Dublin Principles*, yang dihasilkan di Dublin Irlandia pada tanggal 31 Januari 1992 mengemukakan bahwa kesehatan manusia, keamanan pangan, kesejahteraan, pengembangan industri beserta ekosistem sangat tergantung pada air dan tanah. Isi dari *Dublin Principles* menyatakan bahwa air sebagai benda ekonomi sehingga air memiliki nilai ekonomi. Namun walaupun air memiliki nilai ekonomi, hak akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi tetap

dalam biaya yang terjangkau masyarakat.

Peran pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia salah satunya adalah dengan memenuhi hak rakyat untuk dapat memperoleh air bersih yang layak. Kewajiban negara atau pemerintah untuk menjamin hak atas sumber daya air agar dapat diakses masyarakat tanpa diskriminasi baik oleh laki-laki maupun perempuan ditegaskan dalam dalam *General Comment No. 15 ICESCR* yang dikeluarkan oleh *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 2002. Selain itu negara juga diwajibkan untuk memberikan kemudahan fasilitas untuk mengakses air bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan akses.

Sementara itu, di Indonesia sendiri negara atau pemerintah menghadapi masalah dalam hal ketersediaan anggaran untuk mewujudkan infrastruktur pelayanan air bersih kepada masyarakat, sehingga pemerintah membutuhkan pihak lain untuk membantu pembangunan infrastruktur tersebut. Pemerintah Indonesia mengalami suatu dilema dalam pengelolaan sumber daya alam (Rahman, 2016). Di satu sisi pemerintah ingin mandiri untuk mengelola sumber daya alam agar masyarakat dapat menikmati secara optimal hasil-hasilnya, di sisi lain pemerintah terkendala dalam hal modal, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi untuk mengelolanya.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air adalah dengan melibatkan pihak swasta untuk kerjasama membangun infrastruktur melalui berbagai alternatif skema pembiayaan. Adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya air maka pihak swasta diundang untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air (Rahman, 2016).

Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan swasta atau badan usaha dalam pembangunan infrastruktur disebut dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU bukan suatu pengalihan kewajiban pemerintah dalam hal menyediakan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi KPBU memberikan fasilitas kepada pihak swasta untuk berpartisipasi melalui kontribusi anggaran untuk membiayai, merancang, membangun, dan mengoperasikan berbagai proyek infrastruktur. KPBU selain dapat membantu dalam hal pembiayaan, namun dapat meningkatkan kualitas SDM, kompetensi manajerial, serta dapat mentransfer teknologi sehingga kinerja

pelayanan kepada masyarakat semakin baik (Pangeran *et al.* 2012).

Skema KPBU menjadi alternatif dalam pembangunan proyek infrastruktur karena adanya keterbatasan fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur padahal permintaan terhadap fasilitas infrastruktur ekonomi dan sosial selalu meningkat (PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, 2018). Pangeran *et al.* (2012) menyatakan bahwa KPBU menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan infrastruktur akibat keterbatasan anggaran pemerintah (Pangeran *et al.*, 2012). Faktor lainnya adalah dalam skema KPBU terdapat efisiensi dan transfer risiko (PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, 2018). Sektor swasta dapat membantu menyediakan layanan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur secara lebih efisien. Di sisi lain, pemerintah dapat lebih fokus pada kepastian pelayanan masyarakat beserta dengan regulasinya dan tidak terbebani dengan risiko-risiko proyek yang muncul karena sebagian risiko ditanggung oleh sektor swasta.

Salah satu infrastruktur penyediaan air minum yang dibangun pemerintah dengan skema KPBU adalah Proyek SPAM Umbulan di Provinsi Jawa Timur. Proyek SPAM Umbulan merupakan proyek nasional lintas Kabupaten/Kota yang melayani Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Proyek SPAM Umbulan Potensi mata air Umbulan sebagai sumber mata air untuk SPAM Umbulan memiliki debit kurang lebih 4.000 lt/detik, namun selama ini hanya dimanfaatkan sebatas kurang dari 1.000 lt/detik, sedangkan sisanya mengalir ke laut (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu membahas tentang Proyek SPAM Umbulan. Pitriyani, Suryono dan Noor (2015) menganalisis tentang alur proses KPBU pada Proyek SPAM Umbulan beserta dukungan pemerintah. Pranata (2016) meneliti Proyek SPAM Umbulan dari sisi hubungan atau koordinasi antar stakeholdernya dalam konteks *open government*. Muzakki (2017) menganalisis model komunikasi politik dari masyarakat maupun pemerintah yang terlibat pada Proyek SPAM Umbulan. Penelitian tentang model pengelolaan SPAM Umbulan sebagai suatu model bisnis air minum belum banyak mendapat perhatian. Penelitian ini hendak menganalisis kerjasama kontrak

bisnis Proyek SPAM Umbulan serta model bisnisnya sehingga dapat diketahui proses bisnis pengelolaan SPAM dengan skema KPBU.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model bisnis Proyek SPAM Umbulan dengan skema KPBU, mengetahui kendala yang dihadapi pada kontrak Proyek SPAM Umbulan, mengetahui peluang serta proyeksi keberhasilan kontrak Proyek SPAM Umbulan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang hendak menerapkan pengelolaan SPAM di daerahnya dengan model bisnis KPBU.

### MATERI DAN METODE PENELITIAN

Skema KPBU dilaksanakan melalui suatu kontrak kerjasama. Dalam dunia bisnis kontrak menjadi hal yang penting karena kontrak merupakan suatu kerangka dasar dari bingkai hubungan para pelaku kegiatan ekonomi (Diputra, 2016). Kontrak bisnis pada dasarnya berawal dari adanya motif untuk mendapatkan keuntungan kedua pihak. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang didasari oleh adanya kehendak sukarela dalam rangka mencapai tujuan yang menguntungkan dan adil bagi para pihak (Priyono, 2018). Kontrak bisnis timbul dari adanya perbedaan kepentingan yang kemudian terakomodir dalam kontrak, disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku dan mengikat para pihak (Ramziati, *et al.*, 2019).

Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terkait didalamnya bermuatan bisnis. Adapaun bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Kontrak bisnis terdiri atas beberapa macam yang dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan salah satunya adalah berdasarkan hubungan bisnis yang terjadi antara perusahaan dengan mitra bisnis karena sama-sama mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu proyek atau kerjasama bisnis tertentu, terdapat dua macam kontrak bisnis yaitu kontrak kerjasama operasi dan kontrak *joint venture*.

Kontrak kerjasama operasi yaitu sebagai suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih

yang bersama-sama telah sepakat untuk menyelesaikan proyek, baik dengan mendirikan entitas baru maupun tanpa mendirikan entitas hukum baru (Mauliyani *et al.*, 2013). Contoh kerjasama bisnis dengan skema kontrak kerjasama operasi adalah kerjasama dalam proyek infrastruktur pemerintah. *Joint venture* adalah suatu upaya dari aktivitas komersial oleh dua atau lebih pihak melalui suatu lembaga yang didirikan untuk melakukan tujuan bersama (Wicaksono (2017). Pengertian ini menunjukkan apabila dalam *joint venture* terdapat kegiatan mendirikan lembaga atau organisasi baru. Contoh perusahaan dengan kontrak *joint venture* yaitu proyek pelabuhan, telekomunikasi, pelayanan, penerbangan, air minum, serta kereta api umum.

Kontrak bisnis diklasifikasikan menjadi 3 macam berdasar sifat, ruang lingkup, dan jangkauan hukumnya (Ramziati, *et al.*, 2019). Kontrak bisnis internasional adalah kontrak bisnis yang mengandung unsur internasional baik pelakunya maupun substansinya. Kontrak bisnis nasional merupakan kontrak bisnis yang tidak memiliki unsur internasional baik pelakunya maupun substansinya. Kontrak bisnis yang berdimensi publik yaitu kontrak bisnis dengan salah satu pihaknya adalah pemerintah atau aparatnya sepanjang memiliki wewenang untuk mengikatkan diri pada suatu kontrak. Dalam hal ini, kontrak yang dilakukan oleh BUMN dengan pihak lain tidak termasuk kontrak bisnis karena BUMN bukan termasuk entitas publik melainkan sebuah badan hukum (Ramziati, *et al.*, 2019).

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PUPR membedakan KPBU menjadi dua macam berdasarkan inisiator atau pemrakarsa kegiatan yaitu 1) prakarsa oleh badan usaha sebagai kerjasama KPBU yang diprakarsai oleh badan usaha dengan proposal harus sesuai persyaratan yang sudah disesuaikan dengan rencana induk sektor pemerintah, kelayakan proyek secara finansial maupun ekonomi, serta kecukupan kemampuan keuangan oleh badan usaha agar dapat mendanai pelaksanaan proyek yang diprakarsai dan 2) prakarsa pemerintah/BUMN/BUMD) sebagai kerjasama KPBU dengan diprakarsai oleh pemerintah yang ditawarkan kepada badan usaha untuk dapat dikerjakan bersama melalui skema kemitraan.

Model bisnis proyek SPAM dengan mekanisme KPBU merupakan kerjasama pengelolaan SPAM

oleh pemerintah dengan badan usaha atau swasta, berdasarkan pada syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dengan menggunakan sumber daya dari badan usaha baik sebagian maupun seluruhnya serta terdapat pembagian risiko pada kedua belah pihak.

BPPSPAM Kementerian PUPR menyebutkan mengenai beberapa persyaratan mekanisme kerjasama SPAM secara KPBU, yaitu 1) proyek kerjasama layak baik secara ekonomi maupun finansial, meliputi finansial tanpa *viability gap fund* (VGF) dan finansial marginal mendapatkan dukungan berupa VGF dan/atau bentuk dukungan APBN dari Kementerian PUPR; 2) proyek kerjasama merupakan penugasan dari Bupati/Walikota kepada PDAM yang akan bertindak sebagai PJPK; 3) mendapatkan dukungan Penjaminan dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai wakil dari Kementerian Keuangan; 4) mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan berupa *Project Development Facilities* (PDF); 5) KPBU yang dilaksanakan secara *Unsolicited*, maka tidak dapat memperoleh VGF dan bantuan dana dari APBN Kementerian PUPR, tidak mendapatkan dukungan Penjaminan dari PT. PII, serta dilaksanakan melalui sistem pelelangan secara terbuka dan transparan; dan 6) KPBU yang dilaksanakan secara *Solicited*, maka berhak mendapatkan bantuan VGF, mendapatkan Penjaminan dari PT. PII, serta dapat memperoleh dukungan dari Kementerian PUPR.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber yang terkait Proyek SPAM Umbulan meliputi narasumber dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta dari PDAM Kota Surabaya. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder terkait Proyek SPAM Umbulan yang meliputi peraturan perundangan sebagai dasar hukum, dokumen kajian pra studi kelayakan, profil Proyek SPAM Umbulan, laporan hasil rapat, artikel jurnal, serta hasil kajian tesis atau disertasi penelitian sebelumnya.

## HASIL PENELITIAN

Skema KPBU pada Proyek SPAM Umbulan melahirkan jalinan kerjasama yang diwujudkan dalam suatu kontrak bisnis antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan badan usaha swasta yaitu PT. Meta Adhiya Tirta Umbulan yang merupakan perusahaan konsorsium bentukan PT Medco Energi Internasional Tbk dan PT Bangun Cipta Kontraktor sebagai pemenang lelang Proyek SPAM Umbulan. Sesuai definisi PPP atau KPBU menurut Wolters (2015), Proyek SPAM Umbulan sebagai suatu kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan badan usaha untuk menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur khususnya untuk masyarakat 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

Proyek SPAM Umbulan termasuk klasifikasi kontrak bisnis yang berdimensi publik, karena salah satu pihak yang terikat kontrak adalah pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kontrak Proyek SPAM Umbulan mengandung kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) berkewajiban antara lain dalam hal pengadaan tanah untuk lokasi proyek, dukungan pengurusan perizinan, penyusunan AMDAL, serta penguatan modal pada PDAB Provinsi Jawa Timur sebagai operator atau pengelola proyek. Hak yang dimiliki Pemprov Jawa Timur berupa layanan air bersih kepada masyarakat 5 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sementara itu badan usaha, berkewajiban membangun serta mengelola infrastruktur proyek sesuai lingkup pekerjaan yang ditetapkan dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah dalam kontrak kemudian mengembalikan aset infrastruktur tersebut kepada Pemprov Jawa Timur setelah masa kerjasama selesai. Badan usaha memiliki hak berupa keuntungan finansial bagi perusahaan melalui pembayaran tarif air oleh pemerintah.

Proyek SPAM Umbulan menjadi proyek pertama di bidang air minum yang menggunakan skema KPBU. Sesuai definisi PPP atau KPBU menurut Koschatzky (2017) sifat kerjasama Proyek SPAM Umbulan adalah joint pembiayaan dan joint operation (kerjasama operasi). Joint pembiayaan berupa pembi-

ayaan bersama terhadap proyek, namun pembiayaan dari pemerintah bersifat bantuan atau dukungan. Pemerintah memberikan bantuan dana pada Proyek SPAM Umbulan sebagai bentuk dukungan agar proyek bisa layak secara ekonomi dan finansial. Kelayakan ekonomi dicapai dengan terjangkaunya tarif oleh masyarakat, sedangkan kelayakan finansial dicapai oleh badan usaha dengan adanya keuntungan finansial bagi perusahaannya. Joint operation meliputi pembagian kewenangan atau ruang lingkup kegiatan, sehingga tidak semua pekerjaan dilakukan oleh badan usaha sebagai pelaksana utama proyek. Ruang lingkup pemerintah terutama dalam proses distribusi air minum langsung ke masyarakat yang dilakukan oleh PDAM.

Sementara itu pengertian PPP menurut Khitam (2012) yang berdasarkan pada kepentingan mencari keuntungan, Proyek SPAM Umbulan terdiri atas dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan badan usaha. Pemerintah memiliki kepentingan sosial berupa pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat, sedangkan badan usaha memiliki kepentingan finansial bagi perusahaannya. Hal ini berbeda dengan tujuan kontrak bisnis yang semua pihak terdiri atas perusahaan swasta karena keduanya mempunyai motif yang sama untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Bentuk kontrak kerjasama Proyek SPAM Umbulan sesuai bentuk-bentuk partnership oleh *Asian Development Bank* (2000) dan *World Bank* (2004) adalah kontrak *build operate transfer*. Pihak badan usaha membangun infrastruktur proyek kemudian mengoperasikannya sesuai kesepakatan kontrak kemudian setelah masa kontrak berakhir yaitu selama 25 tahun maka aset infrastruktur dikembalikan ke pemerintah dalam hal ini adalah Pemprov Jatim selaku PJPK. Aset infrastruktur yang dikembalikan tersebut harus dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan.

Ide tentang Proyek SPAM Umbulan pada mulanya berasal dari pemerintah khususnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur sehingga Proyek SPAM Umbulan termasuk kategori Proyek KPBU *Solicited* yaitu proyek yang dibuat atas inisiasi pemerintah yang kemudian ditawarkan ke badan usaha untuk dikerjasamakan. Perencanaan Proyek SPAM Umbulan sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1972 dan proses penawaran ke pihak swasta sudah banyak dilakukan. Banyak kendala muncul yang membuat Proyek

SPAM Umbulan sulit terealisasi hingga akhirnya pada tahun 2010 muncul kajian untuk melaksanakan Proyek SPAM Umbulan dengan skema KPBU. Hasil kajian berhasil menjadikan proyek terlaksana hingga mencapai *financial close* pada tanggal 30 Desember 2016 yang berarti bahwa proyek dapat dilaksanakan karena layak baik secara ekonomi maupun finansial. Hal ini merupakan syarat suatu proyek dapat dilaksanakan secara KPBU yaitu layak ekonomi dan layak finansial.

Sesuai kriteria yang dikeluarkan BPPSPAM Kementerian PUPR, proyek KPBU yang dilaksanakan secara *Solicited*, maka berhak mendapatkan bantuan VGF, mendapatkan Penjaminan dari PT. PII, serta memperoleh dukungan dari Kementerian PUPR. Proyek SPAM Umbulan merupakan proyek KPBU di sektor air minum yang pertama kali mendapatkan bantuan VGF serta mendapat bantuan penjaminan dari pemerintah. Menurut PMK No. 223 Tahun 2012, VGF adalah kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU.

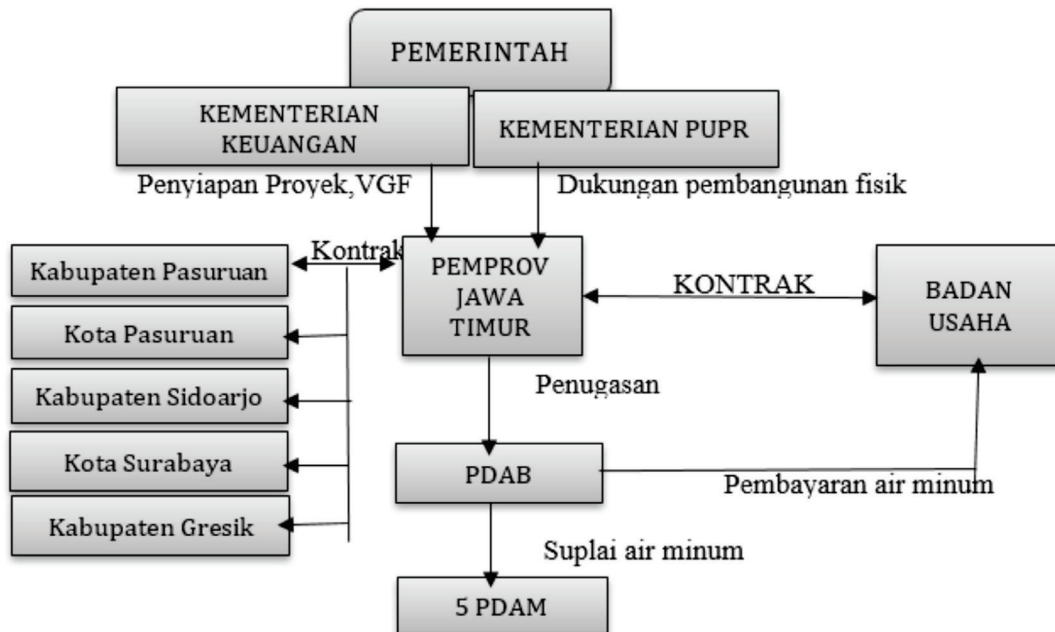
Kementerian Keuangan (2016) menyebutkan mengenai tujuan VGF yaitu 1) untuk meningkatkan kelayakan proyek dalam rangka untuk menarik minat investor agar berpartisipasi dalam skema KPBU; 2) untuk memastikan kualitas dan waktu pada saat proses lelang proyek KPBU, 3) untuk memberikan pelayanan publik dengan tarif yang terjangkau masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan VGF pada Proyek SPAM Umbulan sebesar 818 Milyar. Penjaminan diberikan berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Pemerintah untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Tujuan penjaminan adalah untuk meningkatkan kepercayaan para investor dan memberikan kenyamanan pada pemberi pinjaman dalam berinvestasi bidang infrastruktur. Sementara itu, dukungan yang diberikan Kementerian PUPR meliputi 1) pembiayaan dan pembangunan instalasi pengolahan air berkapasitas 300 liter per detik untuk mengolah air dari Sungai Rejoso; 2) memberikan perizinan dalam hal penempatan pipa yang melintasi jalan tol Pasuruan-Gempol, Gempol-Pandaan, Surabaya-Gempol, Surabaya-Mojokerto, dan Surabaya-Gresik; 3) Penurunan biaya sewa tanah untuk pipa yang melintasi jalan tol untuk kelayakan finansial proyek.

Proyek SPAM Umbulan merupakan proyek yang melibatkan banyak lembaga pemerintah. Bagan



I menunjukkan struktur lembaga yang terlibat Proyek SPAM Umbulan. Hubungan dan koordinasi tanggung jawab antar lembaga yang terlibat dalam Proyek SPAM Umbulan diatur lebih lanjut melalui kontrak kerjasama. Hal ini bertujuan agar keberlangsungan pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses bisnis SPAM Umbulan tetap terjaga dan tetap berlanjut hingga masa kerjasama selesai atau berakhir. Kontrak-kontrak yang ada pada Proyek SPAM Umbulan yaitu : (1) Kontrak BOT antara Gubernur Provinsi Jawa Timur selaku PJKP dengan badan usaha, (2) Kontrak air minum curah ada dua yaitu antara PDAB Provinsi Jawa Timur dengan badan usaha dan antara PDAB

Jawa Timur dengan PDAM, (3) Kontrak kerjasama daerah, yaitu antara Gubernur Jawa Timur dengan Bupati/Walikota, (4) Kontrak Penjaminan, yaitu antara PT. PII dengan badan usaha, (5) Kontrak Regres, yaitu antara PT. PII dengan PJKP Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi, kontrak menjadi bagian yang penting dalam rangka untuk menjaga komitmen lembaga-lembaga yang terlibat, mengingat jangka waktu Proyek SPAM Umbulan yang lama. Kontrak-kontrak tersebut juga merupakan suatu kontrol terhadap pelaksanaan SPAM Umbulan agar proses pelayanan air minum ke masyarakat menjadi lancar tidak tersendat.



Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

**Bagan 1**  
**Struktur lembaga Proyek SPAM Umbulan**

Lingkup kegiatan dalam proses bisnis Proyek SPAM umbulan terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan bisnis, yaitu produksi air baku menjadi air curah, penjualan air curah dari badan usaha ke PDAB, distribusi air minum dari PDAM ke masyarakat (end user). Produksi air baku menjadi air curah oleh badan usaha berupa pembangunan sistem produksi intake untuk menampung

air 4.000 liter/detik, sistem transmisi sepanjang 93 km, dan sistem offtake sebanyak 16 unit di 5 kabupaten/kota. Air curah yang diproduksi badan usaha kemudian dijual ke PDAB. Selanjutnya PDAM membeli air curah tersebut ke PDAB kemudian baru menyalurkan ke masyarakat berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan. Kualitas dan kuantitas air yang dihasilkan Proyek

SPAM Umbulan ditentukan oleh pemerintah serta menjadi standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh badan usaha. Jadi, walaupun kewenangan pembangunan infrastrukturnya terdapat di badan usaha namun pemerintah tidak serta merta melepaskannya. Pemerintah masih tetap mengontrol melalui standar pelayanan minimal yang harus ditaati oleh badan usaha sehingga kepentingan masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan sesuai standar tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Kualitas air harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Selanjutnya, untuk kuantitas air yang diproduksi minimal adalah 4.000 liter/detik yang akan diserap oleh masing-masing PDAM 5 kabupaten/kota. Tabel 1 berikut adalah daftar rencana penyerapan air masing-masing daerah.

**Tabel 1**  
**Daftar Rencana Penyerapan Air Masing-Masing PDAM**

No	PDAM Kabupaten/Kota	Jumlah Penyerapan Air lt/detik
1	Kota Pasuruan	110
2	Kabupaten Pasuruan	440
3	Kabupaten Sidoarjo	1200
4	Kota Surabaya	1000
5	Kabupaten Gresik	1000
	Jumlah Total	3.750

**Sumber:** Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya, dalam hal penentuan tarif air minum Hasrul (2017) menyatakan bahwa penentuan tarif dalam proyek air minum melibatkan beberapa kegiatan yaitu *Real Demand Survey* (RDS), perhitungan *capital expenditures* dan *operational expenditures*, serta pendampingan untuk mengajukan dukungan dari pemerintah jika dibutuhkan. Pelaksana kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari konsultan atau tenaga ahli di bidang teknis, hukum, dan keuangan. RDS menghasilkan informasi mengenai perkiraan tarif dari sisi permintaan (demand) dalam hal ini masyarakat, sedangkan kegiatan perhitungan capex dan opex menghasilkan informasi mengenai perkiraan tarif dari sisi penawaran (supply) yaitu badan usaha. Apabila terdapat gap dari kedua tarif tersebut, maka mengindikasikan adanya kebutuhan terhadap Dukungan Pemerintah untuk membantu memperoleh titik temu antara sisi permintaan dan sisi penawaran sehingga dapat ditentukan tarif sesuai kesepakatan.

Proyek SPAM Umbulan menggunakan mekanisme *Real Demand Survey* melalui konsultasi publik untuk menentukan tarif. Tujuan RDS adalah untuk memperoleh informasi terkait pandangan masyarakat terhadap pelayanan air minum dari Proyek SPAM Umbulan. Informasi yang digali meliputi kualitas layanan

yang diinginkan, kemampuan membayar masyarakat, kemauan membayar masyarakat, serta kemauan untuk menggunakan layanan air. Kegiatan RDS Proyek SPAM Umbulan dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Timur dengan pendampingan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui PT. SMI. Perhitungan Capex Opex Proyek SPAM Umbulan menghasilkan tarif sebesar Rp. 3.356/meter kubik. Kegiatan RDS menghasilkan tarif sebesar Rp. 2.533/meter kubik. Selanjutnya, karena tarif yang dihasilkan RDS dengan tarif berdasar perhitungan capex opex terjadi gap, maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah. Kementerian Keuangan menggelontorkan dana dukungan berupa *Viability Gap Fund* (VGF) sebesar 818 Milyar pada Proyek SPAM Umbulan sehingga bisa membantu mendapatkan titik temu tarif yang adil bagi masyarakat maupun badan usaha. Masyarakat mendapatkan tarif yang terjangkau, sedangkan badan usaha tetap mendapatkan keuntungan finansial dengan tarif yang ada tersebut. Tarif rata-rata yang disepakati dari PDAB Jawa Timur ke PDAM masing-masing kabupaten/kota adalah sebesar 2.444/meter kubik. Tarif tersebut berbeda-beda di setiap daerah. Daftar tarif masing-masing daerah dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Daftar tarif air curah per PDAM**

No	Kabupaten/Kota	Tarif Air Rp/Meter Kubik
1	Kota Pasuruan	1.050
2	Kabupaten Pasuruan	1.050
3	Kabupaten Sidoarjo	2.500
4	Kota Surabaya	2.400
5	Kabupaten Gresik	2.750
	Tarif Rata-Rata	2.444

**Sumber:** Pemerintah Provinsi Jawa Timur

## PEMBAHASAN

Kontinuitas jaminan pengaliran air disebutkan dalam standar pelayanan minimal proyek yaitu selama 24 jam. Jadi, sesuai standar mutu, air harus mengalir selama 24 jam secara terus menerus. Kontinuitas air tersebut tentu saja berhubungan dengan peran masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga air yang mengalir di masyarakat tetap lancar tidak tersendat. Salah satu upaya untuk menjaga kontinuitas tersebut tertuang dalam kontrak kerjasama antara Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan bupati atau walikota PDAM 5 kabupaten/kota. Kontrak kerjasama bertujuan untuk menjaga komitmen masing-masing pihak. Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan komitmennya untuk menyalurkan air minum curah dari mata air Umbulan ke masing-masing kabupaten/kota. Sementara itu, kabupaten/kota berkomitmen pada kewajibannya untuk memastikan dan mendukung PDAM agar dapat menyerap sekaligus membayar air curah dengan jumlah dan harga sesuai kesepakatan kepada PDAB Provinsi Jawa Timur. Komitmen masing-masing stakeholders sangat dibutuhkan mengingat Proyek SPAM Umbulan adalah proyek dengan masa kerjasama yang panjang sehingga dikhawatirkan apabila komitmen berkurang atau menurun maka akan mengganggu kelancaran dan keberlanjutan proyek.

Tata kelola proyek SPAM Umbulan dibagi berdasar lingkup pekerjaan masing-masing pihak pelaksana proyek yang disesuaikan juga dengan proses bisnis SPAM Umbulan yaitu 1) Bagian proyek yang dikerjakan badan usaha maka pengelolannya juga oleh badan usaha, contoh bagian sistem produksi air dan jalur pipa transmisi utama pengelolaannya apabila terjadi kerusakan yang bertanggungjawab adalah badan

usaha; 2) bagian jaringan distribusi utama sampai dengan reservoir maka pengelolaannya oleh PDAB Provinsi Jawa Timur. Contoh pengelolaan adalah jika terjadi kebocoran maka PDAB yang memperbaiki, (3) bagian distribusi air ke masyarakat dari titik serah, merupakan kewenangan PDAM sehingga apabila ada sambungan baru ataupun terjadi kerusakan serta kebocoran air di jalur distribusi ke masyarakat maka yang berwenang memperbaiki adalah PDAM setempat.

Secara keseluruhan tata kelola Proyek SPAM Umbulan dilakukan oleh beberapa pihak melalui pembagian sesuai lingkup kewenangannya. Namun demikian, setelah masa kerjasama berakhir dan aset dikembalikan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PJPK, maka pengelolaan SPAM Umbulan selanjutnya akan diserahkan seluruhnya kepada PDAB Provinsi Jawa Timur sebagai operator pelaksana proyek SPAM Umbulan.

Minimnya pengetahuan dan pengalaman pemerintah terhadap skema kontrak KPBU menjadi suatu kendala yang utama. Proyek SPAM Umbulan termasuk salah satu proyek show case pertama di bidang air minum yang menggunakan skema KPBU. Bappenas melalui PPP Book yang dikeluarkan pada tahun 2010, menyebutkan tentang lima proyek nasional yang menjadi show case dan mendapatkan perhatian penting dari pemerintah yaitu Proyek Pelabuhan Tanah Ampo Karangasem Bali, Proyek Pembangunan Stasiun Kereta Manggarai – Bandara Soekarno Hatta, Proyek PLTU Batang Jawa Tengah, Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan –Kuala Namu- Tebing Tinggi, Proyek SPAM Umbulan Jawa Timur.

Proyek *Show Case* merupakan suatu proyek percontohan dan karena proyek percontohan sehingga tidak ada proyek sebelumnya yang bisa dija-

dikan acuan. Hal ini berdampak pada kesiapan aparat pelaksana proyek di dalam menyusun kontrak Proyek SPAM Umbulan. Pengalaman yang masih minim serta pengetahuan yang belum mencukupi tentang skema KPBU membuat penyusunan kontrak Proyek SPAM Umbulan membutuhkan waktu yang lama terutama pada tahap penyiapan karena pada tahap ini yang terdiri atas banyak proses dengan persyaratan dokumen yang banyak.

Pemerintah menunjuk Kementerian Keuangan melalui PT SMI untuk membantu melakukan pendampingan terhadap PJPK mulai dari kegiatan penyiapan proyek, transaksi proyek sampai dengan financial close yaitu tahap pemenuhan biaya, yang ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian pinjaman atau kredit oleh badan usaha. Selain itu badan usaha juga sudah mendapatkan pencairan dana (draw-down) untuk pembiayaan proyek. Sementara itu Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membantu proses penyiapan proyek dalam hal teknis.

Selanjutnya, pencabutan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjadi suatu kendala dalam hal regulasi. Kajian terhadap Proyek SPAM Umbulan dilakukan sejak tahun 2010, dan pada tahun 2011 mulai dilakukan proses penyiapan proyek. Di tengah tahapan proses penyiapan proyek, tepatnya di tahun 2013 terjadi pencabutan undang-undang pengelolaan sumber daya air yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, padahal undang-undang tersebut yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Proyek SPAM Umbulan. Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 mengandung prinsip-prinsip tentang keterlibatan swasta dalam proyek pengelolaan sumber daya air.

Akibat pencabutan UU No. 7 Tahun 2004 menimbulkan dampak pada tersendatnya pelaksanaan Proyek SPAM Umbulan sekitar satu tahun karena menunggu undang-undang baru sebagai dasar hukum. Selain itu dampak lainnya adalah peraturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya air termasuk SPAM untuk selanjutnya juga harus mengikuti prinsip-prinsip yang dikeluarkan MK.

Upaya yang dilakukan pemerintah agar Proyek SPAM Umbulan tidak tersendat terlalu lama adalah pemerintah segera mengeluarkan peraturan yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melangkah selanjutnya. Di antara peraturan yang dikeluarkan pemerintah

adalah PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Kedua peraturan tersebut mengatur secara lebih spesifik tentang pengelolaan SPAM. Selanjutnya, dalam hal prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air oleh MK, Proyek SPAM Umbulan sudah memenuhi sehingga proyek bisa jalan terus. Pemenuhan ketentuan tersebut adalah dalam hal keterlibatan sektor swasta dalam lingkup pengelolaan SPAM. Sebelum UU SDA dicabut, sektor swasta boleh terlibat dalam dari hulu ke hilir atau dari proses produksi air sampai dengan proses distribusi air ke masyarakat. Setelah UU SDA dicabut dan keluar Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, maka keterlibatan sektor swasta menjadi terbatas hanya pada proses produksi air saja. Pihak swasta hanya boleh membangun di bagian produksi berupa construction dan operation, sedangkan di bagian distribusi hanya boleh melakukan construction saja tidak boleh operation. Secara kebetulan dari awal perencanaan Proyek KPBU SPAM Umbulan memang dirancang dengan sistem kerjasama bisnis yang tidak full oleh swasta sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip MK.

Adanya kepentingan daerah yang menimbulkan sikap ego sektoral pada daerah menjadi kendala yang ketiga. Pada awalnya, ide tentang SPAM Umbulan berasal dari adanya masalah kesenjangan ketersediaan air baku di beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur. Ada daerah yang berlimpah sumber air bakunya namun ada juga daerah yang kekurangan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam rangka mengatasi hal tersebut adalah melalui kebijakan *sharing* air antardaerah. Hal inilah yang melahirkan adanya pengelolaan SPAM Regional. SPAM Umbulan termasuk SPAM Regional karena melibatkan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan sumber mata air baku Umbulan yang terletak di Kabupaten Pasuruan untuk dimanfaatkan ke beberapa kabupaten/kota sekitar.

Kebijakan *sharing* air melalui SPAM Regional tidak serta merta mudah dilaksanakan. Hal ini karena terkait kepentingan setiap daerah dan ego sektoral masing-masing daerah. Daerah yang memiliki sumber mata air berlimpah merasa lebih berhak memiliki serta melakukan pengelolaan sendiri untuk kepentingan daerahnya. Pada Proyek SPAM Umbulan, sumber

mata air Umbulan terletak di Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, Kota Pasuruan juga merasa memiliki lahan tapak Umbulan karena Kota Pasuruan memiliki sertifikat hak pakai yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur pada jaman dahulu. Sertifikat hak pakai tersebut memberikan konsesi atau hak kepada Kota Pasuruan untuk menguasai lahan mata air Umbulan.

Ego sektoral menjadi suatu kendala dalam proses menentukan tarif air. Apalagi daerah yang merasa memiliki sumber mata air. Adanya rasa memiliki mengakibatkan sulitnya mencapai kesepakatan. Negosiasi yang dilakukan untuk menentukan tarif cukup alot. Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan yang merasa memiliki sumber mata air Umbulan meminta adanya hak-hak istimewa bagi daerahnya masing-masing. Kedua daerah tersebut menginginkan tarif yang lebih rendah dari daerah lain, sehingga akhirnya diputuskan bahwa tarif air untuk Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan ditetapkan sebesar Rp. 1.050/meter kubik, lebih rendah dari ketiga daerah lainnya.

Mata air Umbulan merupakan sumber mata air melimpah dengan debit yang besar terletak di bawah kaki gunung Bromo dan Semeru. Di samping itu, kualitas air Umbulan juga baik untuk digunakan sebagai air minum. Hal ini menjadi peluang bagi Proyek SPAM Umbulan yang direncanakan dapat melayani kebutuhan air minum untuk 1,3 juta lebih masyarakat Provinsi Jawa Timur dengan 310 ribu sambungan rumah yang berada di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Pelayanan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan domestik agar masyarakat dapat menikmati air minum yang berkesinambungan selama 24 jam, harga yang terjangkau, serta air yang layak dan berkualitas sehingga dapat turut meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Adanya sikap yang solid dari pemerintah terutama pemerintah pusat juga menjadi suatu peluang keberhasilan kontrak Proyek SPAM Umbulan. Sikap solid pemerintah tersebut terwujud dalam persamaan persepsi yaitu Proyek SPAM Umbulan harus jadi. Seluruh stakeholder yang terlibat dari unsur pemerintah, baik dari tingkat menteri, dirjen, eselon 2, sampai ke tim pelaksana menunjukkan perhatian dan semangat yang solid agar Proyek SPAM Umbulan jadi dilaksanakan. Faktor pendorong semangat yang solid tersebut karena Proyek SPAM Umbulan adalah proyek

*show case* sekaligus proyek strategis nasional sehingga mendapat perhatian pokok dan penting dari presiden. Status sebagai proyek *show case* menjadikan Proyek SPAM Umbulan sebagai proyek percontohan bagi proyek infrastruktur air minum dengan skema KPBU sehingga bisa menjadi role model bagi pembangunan infrastruktur selanjutnya. Oleh karena itu, keberhasilan Proyek SPAM Umbulan menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah.

Informasi dari narasumber dari PT. SMI mengatakan bahwa solidnya pemerintah pusat terhadap Proyek SPAM Umbulan sangat membantu dalam hal negosiasi di tingkat pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saat kegiatan dealing atau negosiasi di tingkat pemerintah daerah contoh saat dealing dengan DPRD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, dapat dilaksanakan dengan lancar karena adanya dukungan dari pemerintah pusat. Contoh lain adalah adanya pencabutan UU SDA yang sempat menghambat jalannya proyek juga dapat dilalui karena pemerintah pusat langsung sigap menanggapinya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan baru sebagai payung hukum.

Proyek SPAM Umbulan merupakan proyek infrastruktur di bidang penyediaan air minum, sedangkan air minum adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tugas dan kewajiban utama pemerintah yaitu melayani kebutuhan hidup masyarakat sehingga keberadaan Proyek SPAM Umbulan menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah sangat mendukung keberlanjutan serta keberhasilan Proyek SPAM Umbulan. Dukungan pemerintah terhadap Proyek SPAM Umbulan sangat tinggi sehingga hal ini akan berimplikasi positif terhadap proyeksi tingkat keberhasilan proyek. Dukungan pemerintah diwujudkan oleh para stakeholder proyek melalui pemberian berbagai fasilitas seperti pendampingan proses pelaksanaan proyek sampai dengan financial close, bantuan dana agar tarif dapat terjangkau masyarakat tanpa merugikan badan usaha, dukungan perizinan, dan dukungan proses pembebasan lahan.

Proyeksi tingkat keberhasilan Proyek SPAM Umbulan didorong juga dengan adanya dukungan masyarakat. Pada saat proses konsultasi publik dapat diketahui bahwa tanggapan masyarakat terhadap Proyek SPAM Umbulan baik. Rata-rata masyarakat

5 kabupaten/kota yang mendapat pelayanan SPAM Umbulan mendukung adanya Proyek SPAM Umbulan. Hal ini berdasar informasi narasumber dari PT. SMI yang membantu mendampingi kegiatan konsultasi publik dalam rangka penentuan tarif air curah. Dukungan masyarakat terhadap Proyek SPAM Umbulan baik karena masyarakat berharap SPAM Umbulan dapat meningkatkan kualitas pelayanan air minum menjadi lebih baik. Bahkan masyarakat rela membayar tarif lebih tinggi dari tarif *existing* asalkan layanan air bagus, lancar dan tidak macet-macet. Informasi yang serupa juga diperoleh dari narasumber PDAB Provinsi Jawa Timur. Masyarakat tidak begitu terpengaruh dengan perubahan tarif sebelum dan sesudah ada Proyek SPAM Umbulan karena tarif masih dalam jangkauan daya beli masyarakat sehingga keberadaan Proyek SPAM Umbulan diterima dengan baik oleh masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Model bisnis skema KPBU pada Proyek SPAM Umbulan dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha dalam suatu kontrak bisnis. Badan usaha membangun infrastruktur proyek dan mengoperasikannya berdasar standar minimal layanan yang dibuat oleh pemerintah. Setelah jangka waktu kontrak kerjasama berakhir maka badan usaha akan mengembalikan aset infrastruktur kepada pemerintah dengan syarat aset infrastruktur bisa beroperasi. Keterlibatan badan usaha swasta terbatas pada pembangunan konstruksi infrastruktur, sedangkan operasional atau proses distribusi pelayanan air ke masyarakat dilakukan oleh pemerintah melalui PDAM.

Beberapa kendala yang dihadapi selama proses penyusunan kontrak kerjasama dapat teratasi dan peluang-peluang yang ada juga dapat menjadi faktor pendorong keberlanjutan serta keberhasilan kontrak Proyek SPAM Umbulan.

### Saran

Proyek SPAM Umbulan sebagai proyek KPBU dengan masa kerjasama yang panjang membutuhkan sumber daya manusia pelaksana yang mantap dan memiliki

kompetensi yang cukup terutama terhadap konsep KPBU. Pendalaman materi KPBU lebih ditekankan lagi khususnya pada aparat pemerintah daerah sehingga ke depan proyek-proyek KPBU dapat dilaksanakan dengan lancar. Regulasi yang cukup melalui standar operasional untuk setiap proses bisnis KPBU juga menjadi hal yang penting agar proses pelaksanaan proyek berjalan semakin mantap tidak meraba-raba lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M.Y. 2016. Public Private Partnership Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT. Indraco). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(3): 1-9.
- Aditya, H. 2004. Analisis Pengaruh Merk, Orientasi Strategik, Dan Inovasi Terhadap Keunggulan Bersaing (Studi pada UKM Tanggulangin di Kota Sidoarjo). *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, 3(3): 309-324.
- Ameyaw, E.E. and P.C. Chan, A. 2016. Critical Success Factors for Public-Private Partnership in Water Supply Projects. *Facilities*, 34(3/4): 124-160.
- Anisah, S., Wicaksono, L.S. 2017. *Hukum Investasi*. Yogyakarta: UII Press, 198.
- Carbonara, N., Constantino, N., & Pellegrino, R. 2013. A Three-Layers Theoretical Framework For Analyzing Public Private Partnerships: The Italian Case, organization, technology and management in construction. *International Journal*, 6(2): 799-810.
- Diputra. (2018). Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3): 549.
- Haryanto, T.D. 2010. Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban Dalam Kontrak

- Bisnis. Wacana Hukum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. *Wacana Hukum*, 9(1): 85-97.
- Hasrul. 2017. Pentingnya Peran PDF dalam Skema KPBU. *Jurnal Info Risiko Fiskal* 2: 10-14.
- Hernoko, A.Y. 2014. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khitam, M. C. 2012. Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal EKBIS*, 4(1): 333-349.
- Koschätzky, K. 2017. A Theoretical View on Public-Private Partnerships in Research and Innovation in Germany. Working Papers Firms and Region No. R2/2017, 1-27
- Maramis, J.B. 2018. Faktor-Faktor Sukses Penerpaan KPBU sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian, *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, 5(1): 49-63.
- Mathur, S. 2014. Public Private Partnership in infrastructure – A study on roads and Highway Project in Andhra Prades. Thesis Doctor Of Philosophy (PhD). Departement of Business management. Osmania University. Hyderabad. 1-277.
- Mauliyani, E. S., Miru, A., & Said, N. 2013. Kedudukan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Dalam Hukum Perusahaan Di Indonesia, *Analisis*, 2(2): 193–200.
- Muzakki, M. 2017. Model Komunikasi Politik Homoheterofili dalam Proyek Sumber Air Umbulan. *Jurnal Heritage*, 5(1).
- Pangeran, M. H., Pribadi, K. S., Wirahadikusumah, R. D., & Notodarmojo, S. 2012. Assessing Risk Management Capability of Public Sector Organizations Related to PPP Scheme Development for Water Supply in Indonesia. *Civil Engineering Dimension*, 14(1): 26-35.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Jakarta.
- Pitriyani, A. Suryono., & Noor, I. 2015. Drinking Water for The People: Public-Private Partnerships for Establishing Drinking Water Supply System in Jawa Timur Province, Indonesia. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 3(08): 57-65.
- Priyono, E.A. 2018. Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba). *Jurnal Law Reform*, 14(1): 15-28.
- PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia. 2018. KPBU sebagai Solusi Pembiayaan Pendukung Infrastruktur. Paparan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
- PU-net. 2013. Kementerian PU Dorong Pemda Bangun SPAM Regional. Retrieved from <https://www.pu.go.id/berita/view/8055>.
- PU-net. 2017. Kementerian PUPR Dorong Semua Pemangku Kepentingan Mendukung Capaian Akses 100 % Terhadap Air Minum. Retrieved from <https://www.pu.go.id/berita/view/11213>.
- Putra, A.P. 2016. Model Public Private Partnership Pada Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan di Jawa Timur dalam Konteks Open Government. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80053>.
- Rahman, I.N. 2016. Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13.
- Ramziati. 2019. *Kontrak Bisnis dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*, Aceh: Unimal Pres.
- Soekarwo. 2018. KPBU SPAM Umbulan: Praktik Berhasil Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Daerah Sistem Penyediaan Air Minum

Umbulan. Retrieved from <https://indonesiadevelopmentforum.com/download/index/1640>.

Syaifuddin, M. 2012. Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Mandar Maju.

UN Economic and Social Council. 2003. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), Retrieved from <https://www.refworld.org/docid/4538838d11.html>.

Wistyani, M.I. 2017. Financial Supports In The Implementation of Public Private Partnership for Water Supply Infrastructure in Indonesia. *Tesis*, Institute for Water Education.



## **PENGARUH MEDIA SOSIAL, REFERENSI, DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN: STUDI KASUS CANDI RATU BOKO YOGYAKARTA**

**M. Sayid Habibur Rohman**  
**Muinah**  
**Susanto**

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
*E-mail:* [sayidhabiburrohman123@gmail.com](mailto:sayidhabiburrohman123@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to study the Analysis of the Influence of Social Media, References and WOM (word of mouth) on Purchasing Decisions: a case study of the Ratu Boko Temple in Yogyakarta. This research is a quantitative study, the sample in this study is the tourists of Ratu Boko Yogyakarta Temple. Data collection was carried out using a questionnaire or questionnaire method. The data analysis technique used is a regression technique supported by the test and classical assumptions, the data obtained is processed using SPSS 21. The results of this study indicate that Social Media has a positive and significant effect on Purchasing Decisions, References have a positive and significant effect on Purchasing Decisions and WOM (word of mouth) have a positive and significant effect on Purchasing Decisions.

**Keywords:** media sosial, referensi, word of mouth, keputusan pembelian

**JEL Classification:** M31

### **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi, sektor pariwisata menjadi salah satu industri utama dalam penguatan ekonomi dunia.

Berbagai Organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan World Tourism Organization (WTO) mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan ekonomi manusia (Aryati dan Damayanti, 2019). Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan pariwisata terbilang sangat pesat, hal tersebut terlihat pada pandangan masyarakat bahwa pariwisata bukan lagi sesuatu yang asing dan tabu, tetapi kini kebutuhan dan keinginan berwisata telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat (Setiyorini *et al.*, 2018).

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang memiliki tujuan memenuhi rasa ingin tahu seseorang, perjalanan tersebut merupakan wujud dari ketertarikan seseorang pada suatu objek wisata (Aryati dan Damayanti, 2019). Media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan dan vice versa (Kaller, 2016).

Media sosial bukanlah media yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Data terbaru dari *we are social*, sebuah agensi *marketing social* pada Januari 2017 lalu menunjukkan adanya 72 juta akun media sosial yang aktif di Indonesia (Bate'e, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang terus berkembang dari jaman ke jaman. Kelompok referensi adalah sekelompok orang yang mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli suatu produk baik barang maupun jasa (Sartono dan Susanti, 2018). *Word of Mouth* menurut *Word Of Mouth Marketing*

*Asssoctiation* adalah suatu aktifitas dimana konsumen memberikan informasi mengenai suatu merek atau produk kepada konsumen lain. Menurut *Above The Line* maupun *Below The Line*, WOM merupakan aktifitas promosi yang tingkat pengendaliannya oleh pasar sangat rendah akan tetapi memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap produk atau merek perusahaan, (Akbar *et al.*, 2019).

PT. Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang destinasi pariwisata yang mana mengelola tiga candi yaitu Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Namun berdasarkan data publikasi dari BPS (badan pusat statistik) Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa Candi Ratu Boko memiliki jumlah pengunjung paling sedikit diantara candi Borobudur dan Prambanan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap objek pemasaran yang ada pada Candi Ratu Boko di Yogyakarta.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata yaitu media dan sosial. Menurut Sudirman (2002) media berasal dari bahasa Yunani “medius” yang berarti medium atau sebagai alat perantara yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Sedangkan sosial sebagai pokok persoalan dalam paradigma ini adalah tindakan sosial (Ritzer, 2003). Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan lain, (Rahman, 2016). Menurut Pamungkas dan Zuhroh (2016), bahwa promosi melalui Media Sosial menjadi strategi pemasaran yang cukup efektif. Dengan demikian dinyatakan bahwa semakin meningkat penggunaan media sosial maka semakin meningkat keputusan pembelian lewat Internet (Rahman, 2016).

**H1:** Sosial Media berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian

### Referensi

Kelompok Referensi adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau

tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut (Kotler&Keller, 2009) Sartono dkk, (2018). menyatakan bahwa konsumen akan memenuhi preferensi kelompok referensi ketika konsumen percaya bahwa informasi yang diberikan tentang produk sangatlah berharga bagi konsumen yang akan membeli suatu produk. Setiadi (2013) menyatakan bahwa kelompok referensi terdiri dari satu orang atau lebih yang digunakan sebagai bahan acuan, sehingga dapat membentuk sikap dan pedoman khusus bagi konsumen dalam memutuskan pembelian. Menurut Ayuningtyas (2016) dalam penelitian menunjukkan bahwa kelompok referensi sangatlah berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

**H2:** Referensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian

### Word Of Mouth (WOM)

Kotler & Keller (2007) mengemukakan bahwa *word of mouth communication (WOM)* atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. WOM merupakan cara yang sangat efektif dan efisien dalam hal penyebaran informasi. Konsumen akan mengumpulkan berbagai informasi sebelum memutuskan membeli atau mengkonsumsi suatu produk, (Pamungkas dan Zuhroh, 2016). WOM yang baik akan dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen dalam memilih suatu produk yang akan dibeli, (Pamungkas dan Zuhroh, 2016).

**H3:** *Word of Mouth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian

### Keputusan Pembelian

Menurut Lamb (2013), keputusan membeli yaitu salah satu komponen utama dari perilaku konsumen. Keputusan pembelian konsumen yaitu tahap demi tahap yg digunakan konsumen ketika membeli barang dan jasa. Pengertian lainnya keputusan pembelian yaitu sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya (Swastha, 2015). Keputusan pembelian didefinisikan sebagai proses dimana konsumen menentukan pilihan

terhadap produk yang ditawarkan, (Grewald dan Levy, 2013). Menurut Solusu (2005), pengambilan keputusan adalah proses memilih alternative cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Pentingnya pengambilan keputusan dilihat dari segi kekuasaan untuk membuat keputusan, yaitu apakah mengikuti pola sentralisasi atau desentralisasi. Pengambilan keputusan selain dilihat dari segi kekuasaan juga dilihat dari segi kehadirannya, yaitu tanpa adanya teori pengambilan keputusan administratif, peneliti tidak dapat mengerti, apakah meramalkan tindakan-tindakan menejemen sehingga peneliti tidak dapat menyempurnakan efektivitas manajemen (Rahman, 2016).

**H4:** Sosial Media, Referensi dan *Word of Mouth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer di mana data ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagi kepada para responden,

yang meliputi identitas dan persepsi responden. Menurut Indrianto dan Supono (2002) data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini responden yang dimaksud adalah para wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata Candi Ratu Boko Yogyakarta. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data menurut Sugiyono (2012). Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dari buku-buku literature, jurnal, internet serta skripsi penelitian sebelumnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu diuji validitas dan reabilitas. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran angket instrumen-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel, yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

**Tabel 1**  
**Indikator Penelitian**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Keputusa Pembelian (Y)	Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk (Kotler, 2015 ).	1. Minat 2. Kecocokan 3. Kebutuhan  Nur'aini, (2016)	Likert
2.	Media Sosial (X1)	Media sosial merupakan suatu wadah yang sangat efektif dalam kegiatan pemasaran.	Kemudahan Kepercayaan Kualitas Informasi  Bate`e (2019)	Likert
3.	Referensi (X2)	Kelompok referensi adalah sekelompok orang yang mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli.	1. Pengetahuan 2. Kredibilitas 3. Pengalaman Keaktifan  Nikenpratiwi, (2012)	Likert
4.	<i>Word of Mouth</i> (X3)	<i>Word Of Mouth</i> terjadi ketika konsumen merasa puas atau tidak puas terhadap suatu produk, dan menceritakan hal tersebut kepada orang lain.	1. Bicara hal positif 2. Rekomendasi 3. Dorongan  Lupiyoadi, (2008)	Likert

**HASIL PENELITIAN**

Berdasar Hasil analisis data diperoleh presentase responden berdasarkan umur responden yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Berdasar Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 16 sampai 20 tahun yakni sebanyak 55 responden.

Berdasar jenis kelamin responden, terdiri atas dua kelompok yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Hasil analisis data diperoleh presentase responden ber-

dasarkan jenis kelain yang ditunjukkan pada tabel berikut

Berdasar Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu perempuan sebanyak 51 responden.

Hasil analisis data diperoleh presentase responden berdasarkan pendidikan terakhir yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Berdasar Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berdasarkan pendidikan dalam penelitian ini yaitu SMA/SMK sebanyak 77 responden (77% ).

**Tabel 2**  
**Responden Menurut Usia**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
16-20	55	55,0	55,0	55,0
21-35	44	44,0	44,0	99,0
36-40	1	1,0	1,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

**Tabel 3**  
**Responden Menurut Jenis Kelamin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	49	49,0	49,0	49,0
Perempuan	51	51,0	51,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

**Tabel 4**  
**Responden Menurut Pendidikan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA/SMK/MA	77	77,0	77,0	77,0
S1	22	22,0	22,0	99,0
S2	1	1,0	1,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Uji Validitas atau uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk *degree of freedom (df) = n-2* pada tingkat signifikansi uji satu arah. Dari hasil analisis didapat nilai korelasi anatar skor item dengan rata-rata skor total. Nilai ini kemudian dengan nilai r-tabel, r-tabel dicari pada signifikansi

0,05 dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel dan jumlah data (n) = 100-2=98 dengan alpha sebesar 5% maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) sebesar 0.1654. Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing-masing variabel.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Validitas dari item – item variabel penelitian**

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Media Sosial	X1	0,819	0,195	Valid
	X2	0,888	0,195	Valid
	X3	0,810	0,195	Valid
Referensi	X1	0,623	0,195	Valid
	X2	0,723	0,195	Valid
	X3	0,786	0,195	Valid
	X4	0,724	0,195	Valid
<i>Word Of Mouth</i>	X1	0,776	0,195	Valid
	X2	0,798	0,195	Valid
	X3	0,806	0,195	Valid
Keputusan Pembelian	X1	0,819	0,195	Valid
	X2	0,904	0,195	Valid
	X3	0,889	0,195	Valid

Berdasar hasil uji validitas dengan jumlah 100 responden dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan mengenai Media Sosial, Referensi, *Word Of Mouth*, dan Keputusan Pembelian yang diajukan untuk responden wisatawan Candi Ratu Boko Yogyakarta adalah valid karena dilihat dari nilai r hitung > r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan

layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

Tujuan uji reliabilitas adalah untuk menguji ketepatan atau keandalan instrumen pengukur dengan konsistensi diantara butir-butir pernyataan dalam suatu instrumen. Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*, item yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian semuanya >0,60 atau 60%.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Reliabilitas dari item-item variabel penelitian**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Media Sosial	,787	Reliabel
Referensi	,678	Reliabel
<i>Word Of Mouth</i>	,701	Reliabel
Keputusan Pembelian	,842	Reliabel

Hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas untuk seluruh variabel diatas yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari nilai kritisnya yaitu 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner dinyatakan handal/reliabel. Artinya, kuesioner memiliki hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran dalam waktu dan

model atau desain yang berbeda.

Pengujian yang digunakan dalam asumsi klasik adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedasitas. Uji Normalitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,49053236
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,061
	Negative	-,078
Kolmogorov-Smirnov Z		,778
Asymp. Sig. (2-tailed)		,581

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasar Tabel 7, hasil uji Kolmogrov-Smirnov menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal yakni *Asymp.Sog* lebih besar dari 0.05, sehingga disimpulkan bahwa residual data distribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variansi dri residual satu pengamatan ke pengamatan grafik *scatter plot* antara nilai prdiksi variabel (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	2,487	,822		3,024	,003	
1	TMS	,070	,050	,141	1,391	,167
	TRF	-,063	,060	-,139	-1,051	,296
	TWM	-,109	,066	-,218	-1,655	,101

a. Dependent Variable: Res1

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah di alam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi akan bebas dri multikolinieritas jika nilai tolerance <0.10 atau jika vif > 10 (Ghozali, 2013).

Berdasar Tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai

tolerance value > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Signifikan Individu (Uji Statistik t) Uji statistik (uji t) dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Diketahui rumus t- tabel yaitu t tabel (df= 100-2, df = 98) sehingga diketahui t- tabel adalah 1,66055.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Multikolineritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,390	1,391		-,280	,780		
TMS	,428	,085	,386	5,042	,000	,914	1,094
TRF	,206	,101	,203	2,037	,044	,537	1,862
TWM	,359	,112	,319	3,204	,002	,540	1,853

a. Dependent Variable: TKP

**Tabel 10**  
**Hasil Analisis Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,390	1,391		-,280	,780
1 TMS	,428	,085	,386	5,042	,000
TRF	,206	,101	,203	2,037	,044
TWM	,359	,112	,319	3,204	,002

a. Dependent Variable: TKP

Uji pengaruh Media Sosial terhadap Keputusan Pembelian pada Tabel 10 diperoleh nilai t hitung sebesar 5,042. Berdasar hasil perhitungan diketahui bahwa t hitung > t tabel yaitu 5,042 > 1,66055. Dengan sig. sebesar 0,000 (0,000<0,05), maka Hipotesis 1 yang menyatakan Media Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian diterima. Uji pengaruh Refrensi terhadap Keputusan Pembelian pada Tabel 10 diperoleh nilai t hitung sebesar 2.037 Berdasar hasil perhitungan diketahui bahwa t hitung > t tabel yaitu 2.037 > 1,66055. Dengan sig. sebesar 0.044 (0,044<0,05), maka Hipotesis 2 yang menyatakan Refresensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembelian Ulang diterima. Uji pengaruh *Word Of Mouth* terhadap Pembelian Ulang pada Tabel 10 diper-

oleh nilai t hitung sebesar 3,204 Berdasar hasil perhitungan diketahui bahwa t hitung > t tabel yaitu 3,204 > 1,66055. Dengan sig. sebesar 0.002 (0,002<0,05), maka Hipotesis 3 yang menyatakan *Word Of Mouth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembelian Ulang diterima.

Berdasar Tabel 11 nampak F hitung sebesar 30.322 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Media Sosial, Refrensi dan *Word Of Mouth* berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian.

Berdasar Tabel 12, *adjusted R<sup>2</sup> square* sebesar 0,470. Angka tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh Media Sosial, Refrensi dan *Word Of Mouth* terhadap Pembelian Ulang secara simultan 47,0%.

**Tabel 11**  
**Hasil Analisis Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

	<b>Model</b>	<b>Sum of Squares</b>	<b>df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
	Regression	208,413	3	69,471	30,322	,000 <sup>b</sup>
1	Residual	219,947	96	2,291		
	Total	428,360	99			

a. Dependent Variable: TKP

b. Predictors: (Constant), TWM, TMS, TRF

**Tabel 12**  
**Hasil Uji R**

**Model Summary<sup>b</sup>**

<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	,698 <sup>a</sup>	,487	,470	1,514

a. Predictors: (Constant), TWM, TMS, TRF

b. Dependent Variable: TKP

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Media Sosial, Refrensi dan *Word Of Mouth* terhadap keputusan pembelian dapat disimpulkan 1) Variabel Media Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada wisata Candi Ratu Boko Yogyakarta; 2) Variabel Refrensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian pada wisata Candi Ratu Boko Yogyakarta; dan 3) Variabel *Word Of Mouth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada wisata Candi Ratu Boko Yogyakarta.

### Saran

Perusahaan harus lebih meningkatkan promosi melalui media sosial agar meningkat kan kunjungan. Petugas yang ada di Candi Ratu Boko harus memberikan layanan yang bagus supaya pengunjung menjadi referensi bagi temannya untuk mengunjungi Wisata Candi Ratu Boko. Perusahaan harus meningkatkan baik dari segi promosi maupun layanan agar pengunjung yang ada

akan menceritakan layanan yang bagus kepada temannya supaya meningkatkan kunjungan dan tetap menjaga kebersihan disekitar Candi agar pengunjung merasa nyaman berada di Candi Ratu Boko. Penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel bebas di luar penelitian ini namun dengan objek yang sama, ataupun dapat menggunakan variabel yang sama, namun lebih memperluas wilayah penelitian ataupun menambahkan sampel yang digunakan sehingga akan memberikan pandangan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandara, B. E. S., Silva, D. A. M. De, Maduwanthi, B. C. H., & Warunasinghe, W. A. A. I. 2016. Impact of food labeling information on consumer purchasing decision: with special reference to faculty of Agricultural Sciences. *Italian Oral Surgery*, 6(Icsusl 2015), 309–313. <https://doi.org/10.1016/j.profoo.2016.02.061>.
- Data, P., Terpercaya, S., & Semua, U. 2020. Berita resmi statistik.



Fatharani, A., Lubis, N., & Dewi, R. S. 2009. Pengaruh Gaya Hidup (Life Style), Harga (Price), dan Kelompok Referensi (Reference Group) terhadap Keputusan Pembelian Telepon Seluler Blackberry (Studi Pada Mahasiswa Program S1 Angkatan 2009 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro): 1–20.

Nur, A., Basri, H., Ahmad, R., Anuar, F. I., & Ismail, K. A. 2016. Effect of Word of Mouth Communication on Consumer Purchase Decision: Malay upscale restaurant. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 222: 324–331. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.175>.

## **INDEKS SUBYEK JURNAL EKONOMI DAN BISNIS**

### **A**

accountability 129, 139, 140

### **B**

budget participation 129, 130, 139, 140  
business contracts 171

### **D**

disclosure of corporate social responsibility 157  
drinking water supply 171, 182

### **E**

e-money 143, 144, 145, 146, 147, 148  
entrepreneurial interests 149  
entrepreneurship education 149

### **F**

family environment 149

### **H**

hardinnes personality 149

### **I**

interest in using 143

### **K**

keputusan pembelian 185, 186, 187, 189, 191, 193

### **M**

media sosial 185, 186, 187, 189, 191, 192

### **P**

perceived usefulness 143, 145, 146  
perceptions of risk 143  
project 171, 174, 181, 182  
promotional appeal 143  
public private partnership 171, 181, 182

### **R**

referensi 185, 186, 187, 189, 192, 193

### **S**

size of the board of commissioners 157  
supervision 129

### **T**

transparency 129, 140  
type of industry 157

### **V**

value for money 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136,  
137, 138, 139, 140

### **W**

word of mouth 185, 186, 187, 189, 191, 192

## **INDEKS PENGARANG JURNAL EKONOMI DAN BISNIS**

### **A**

Andriyani 171

### **D**

Didik Subiyanto 149

Dini Rosdini 171

### **E**

Edo Rifqi Brilianto 143

### **F**

Fitrie Arianti 143

### **H**

Harry Suharman 171

### **K**

Kusuma Chandra Kirana 149

### **M**

Muinah 185

M. Sayid Habibur Rohman 185

### **R**

Revita Rati Nurohmah 157

### **S**

Stefanus Lobo Royman 129

Susanto 185

### **T**

Teguh Erawati 157

Tri Adi Susanto 149

## **PEDOMAN PENULISAN JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (JEB)**

### **Ketentuan Umum**

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan format yang ditentukan.
2. Penulis mengirim tiga eksemplar naskah dan satu *compact disk* (CD) yang berisikan naskah tersebut kepada redaksi. Satu eksemplar dilengkapi dengan nama dan alamat sedang dua lainnya tanpa nama dan alamat yang akan dikirim kepada mitra bestari. Naskah dapat dikirim juga melalui *e-mail*.
3. Naskah yang dikirim belum pernah diterbitkan di media lain yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh semua penulis bahwa naskah tersebut belum pernah dipublikasikan. Pernyataan tersebut dilampirkan pada naskah.
4. Naskah dan CD dikirim kepada *Editorial Secretary*  
Jurnal Ekonomi & Bisnis (JEB)  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 - Fax. (0274) 486155  
*e-mail*: [rudy.badrudin@stieykpn.ac.id](mailto:rudy.badrudin@stieykpn.ac.id)

### **Standar Penulisan**

1. Naskah diketik menggunakan program *Microsoft Word* pada ukuran kertas A4 berat 80 gram, jarak 2 spasi, jenis huruf Times New Roman berukuran 12 *point*, margin kiri 4 cm, serta margin atas, kanan, dan bawah masing-masing 3 cm.
2. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan. Gambar dan tabel dikelompokkan bersama pada lembar terpisah di bagian akhir naskah.
3. Angka dan huruf pada gambar, tabel, atau histogram menggunakan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 *point*.
4. Naskah ditulis maksimum sebanyak 15 halaman termasuk gambar dan tabel.

### **Urutan Penulisan Naskah**

1. Naskah hasil penelitian terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil, Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
2. Naskah kajian pustaka terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Masalah dan Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
3. Judul ditulis singkat, spesifik, dan informatif yang menggambarkan isi naskah maksimal 15 kata. Untuk kajian pustaka, di belakang judul harap ditulis Suatu Kajian Pustaka. Judul ditulis dengan huruf kapital dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 14 *point*, jarak satu spasi, dan terletak di tengah-tengah tanpa titik.
4. Nama Penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademis disertai alamat institusi penulis yang dilengkapi dengan nomor kode pos, nomor telepon, fax, dan *e-mail*.

5. Abstrak ditulis dalam satu paragraf tidak lebih dari 200 kata menggunakan bahasa Inggris. Abstrak mengandung uraian secara singkat tentang tujuan, materi, metode, hasil utama, dan simpulan yang ditulis dalam satu spasi.
6. Kata Kunci (*Keywords*) ditulis miring, maksimal 5 (lima) kata, satu spasi setelah abstrak.
7. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan pustaka yang mendukung. Dalam mengutip pendapat orang lain dipakai sistem nama penulis dan tahun. Contoh: Badrudin (2006); Subagyo dkk. (2004).
8. Materi dan Metode ditulis lengkap.
9. Hasil menyajikan uraian hasil penelitian sendiri. Deskripsi hasil penelitian disajikan secara jelas.
10. Pembahasan memuat diskusi hasil penelitian sendiri yang dikaitkan dengan tujuan penelitian (pengujian hipotesis). Diskusi diakhiri dengan simpulan dan pemberian saran jika dipandang perlu.
11. Pembahasan (*review/kajian pustaka*) memuat bahasan ringkas mencakup masalah yang dikaji.
12. Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang membantu sehingga penelitian dapat dilangsungkan, misalnya pemberi gagasan dan penyandang dana.
13. Ilustrasi:
  - a. Judul tabel, grafik, histogram, sketsa, dan gambar (foto) diberi nomor urut. Judul singkat tetapi jelas beserta satuan-satuan yang dipakai. Judul ilustrasi ditulis dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 point, masuk satu tab (5 ketukan) dari pinggir kiri, awal kata menggunakan huruf kapital, dengan jarak 1 spasi
  - b. Keterangan tabel ditulis di sebelah kiri bawah menggunakan huruf Times New Roman berukuran 10 point jarak satu spasi.
  - c. Penulisan angka desimal dalam tabel untuk bahasa Indonesia dipisahkan dengan koma (,) dan untuk bahasa Inggris digunakan titik (.).
  - d. Gambar/Grafik dibuat dalam program Excel.
  - e. Nama Latin, Yunani, atau Daerah dicetak miring sedang istilah asing diberi tanda petik.
  - f. Satuan pengukuran menggunakan Sistem Internasional (SI).
14. Daftar Pustaka
  - a. Hanya memuat referensi yang diacu dalam naskah dan ditulis secara alfabetik berdasarkan huruf awal dari nama penulis pertama. Jika dalam bentuk buku, dicantumkan nama semua penulis, tahun, judul buku, edisi, penerbit, dan tempat. Jika dalam bentuk jurnal, dicantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor publikasi, dan halaman. Jika mengambil artikel dalam buku, cantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, editor, judul buku, penerbit, dan tempat.
  - b. Diharapkan dirujuk referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi pustaka primer (jurnal) minimal 80%.
  - c. Hendaknya diacu cara penulisan kepastakaan seperti yang dipakai pada JAM/JEB berikut ini:

**Jurnal**

Yetton, Philip W., Kim D. Johnston, and Jane F. Craig. Summer 1994. "Computer-Aided Architects: A Case Study of IT and Strategic Change." *Sloan Management Review*: 57-67.

### **Buku**

Paliwoda, Stan. 2004. *The Essence of International Marketing*. UK: Prentice-Hall, Ince.

### **Prosiding**

Pujaningsih, R.I., Sutrisno, C.L., dan Sumarsih, S. 2006. Kajian kualitas produk kakao yang diamoniasi dengan aras urea yang berbeda. Di dalam: *Pengembangan Teknologi Inovatif untuk Mendukung Pembangunan Peternakan Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional* dalam Rangka HUT ke-40 (Lustrum VIII) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto, 11 Pebruari 2006. Fakutas Peternakan UNSOED, Purwokerto. Halaman 54-60.

### **Artikel dalam Buku**

Leitzmann, C., Ploeger, A.M., and Huth, K. 1979. The Influence of Lignin on Lipid Metabolism of The Rat. In: G.E. Inglett & S.I.Falkehag. Eds. *Dietary Fibers Chemistry and Nutrition*. Academic Press. INC., New York.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Assih, P. 2004. Pengaruh Kesempatan Investasi terhadap Hubungan antara Faktor Faktor Motivasional dan Tingkat Manajemen Laba. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana S-3 UGM. Yogyakarta.

### **Internet**

Hargreaves, J. 2005. Manure Gases Can Be Dangerous. Department of Primary Industries and Fisheries, Queensland Government. <http://www.dpi.gld.gov.au/pigs/9760.html>. Diakses 15 September 2005.

### **Dokumen**

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2006. Sleman Dalam Angka Tahun 2005.

### **Mekanisme Seleksi Naskah**

1. Naskah harus mengikuti format/gaya penulisan yang telah ditetapkan.
2. Naskah yang tidak sesuai dengan format akan dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki.
3. Naskah yang sesuai dengan format diteruskan ke *Editorial Board Members* untuk ditelaah diterima atau ditolak.
4. Naskah yang diterima atau naskah yang formatnya sudah diperbaiki selanjutnya dicarikan penelaah (MITRA BESTARI) tentang kelayakan terbit.
5. Naskah yang sudah diperiksa (ditelaah oleh MITRA BESTARI) dikembalikan ke *Editorial Board Members* dengan empat kemungkinan (dapat diterima tanpa revisi, dapat diterima dengan revisi kecil (*minor revision*), dapat diterima dengan revisi *mayor* (perlu direview lagi setelah revisi), dan tidak diterima/ditolak).
6. Apabila ditolak, *Editorial Board Members* membuat keputusan diterima atau tidak seandainya terjadi ketidaksesuaian di antara MITRA BESTARI.
7. Keputusan penolakan *Editorial Board Members* dikirimkan kepada penulis.
8. Naskah yang mengalami perbaikan dikirim kembali ke penulis untuk perbaikan.
9. Naskah yang sudah diperbaiki oleh penulis diserahkan oleh *Editorial Board Members* ke *Managing Editors*.
10. Contoh cetak naskah sebelum terbit dikirimkan ke penulis untuk mendapatkan persetujuan.
11. Naskah siap dicetak dan cetak lepas (*off print*) dikirim ke penulis.